

LAPORAN BULANAN

JANUARI 2025

Badan Pangan Nasional
Februari, 2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan laporan disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional, maka Badan Pangan Nasional akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Pangan Nasional. Pemantauan dan evaluasi akan dilaksanakan secara periodik termasuk periode bulanan. Dalam hal ini kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan perbulan akan dilaporkan dalam Laporan Bulanan Badan Pangan Nasional. Hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan setiap bulan dapat dijadikan bahan masukan bagi seluruh unit kerja untuk meningkatkan kinerja pelayanan di unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II. Selain itu, bahan dan data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, antara lain berupa instrument evaluasi dan instrument *best practice*, dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan yang akan dipantau dan dievaluasi, bahkan dapat menjadi referensi untuk penyempurnaan Sebagaimana DIPA Awal Badan Pangan Nasional mendapat alokasi anggaran di BA 125 milik Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 329.957.285.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan alokasi di Satker Pusat Rp. 275.718.455.000,- dan di Satker Dekonsentrasi sebesar Rp. 56.138.830.000,- untuk mendukung pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Alokasi anggaran tersebut perlu dipantau pada bulan Januari tahun 2025 terutama terkait penggunaan anggaran se efisien dan efektif mungkin.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka menyajikan laporan yang lebih baik lagi.

Jakarta, Februari 2025
Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

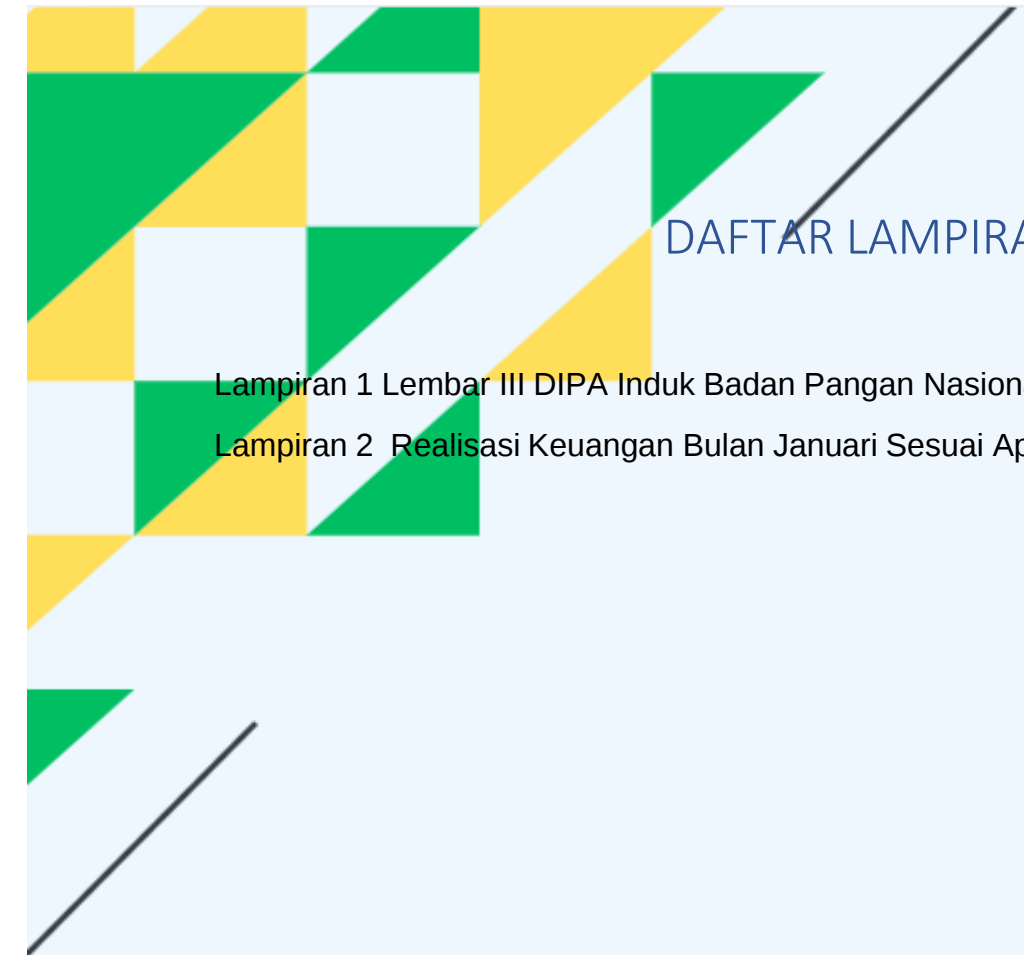
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3 Metode Penyusunan	1
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT	2
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	10
3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan.....	10
3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas	11
3.3 Kegiatan Kepala Badan Pangan Nasional.....	64
BAB IV PENUTUP.....	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Permasalahan	78
4.3 Rekomendasi.....	78
LAMPIRAN	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pagu Blokir Bulan Januari Tahun 2025 Sesuai DIPA Awal.....	2
Tabel 2. Target Fisim dan keuangan Bulan Janurai Tahun 2024 Sesuai DIPA Awal Tahun 2025.....	3
Tabel 3. Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Tahun 2025	10
Tabel 4. Realisasi Fisik dan Keuangan Per RO Bulan Januari Tahun 2025	10
Tabel 5. Realisasi Keuangan Per Kegiatan Bulan Januari Tahun 2025.....	17



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar III DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025	79
Lampiran 2 Realisasi Keuangan Bulan Januari Sesuai Aplikasi SAKTI	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pangan Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan dan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, Kepala Badan melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional. Dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi, Kepala Badan menugaskan pimpinan masing-masing unit kerja eselon I di Lingkungan Badan Pangan Nasional. Laporan realisasi anggaran Badan Pangan Nasional bulan Januari tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja Badan Pangan Nasional di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional pada masa yang akan datang.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi keuangan, keluaran, dan sasaran program lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan.

1.3. Metode Penyusunan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pangan Nasional selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Januari tahun 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Awal pada bulan Januari Tahun 2025 Pada dokumen tersebut bulan Januari ditargetkan sebesar **5,52%**. Alokasi anggaran keseluruhan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025 sebesar Rp. 329.957.285.000,- dengan alokasi di Satker Pusat sebesar Rp. 275.718.455.000,- dan Satker Dekonsentrasi pada 38 Provinsi se Indonesia total sebesar Rp.56.138.830.000,-. Untuk mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp. 212.893.458.000,- dan mendukung Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 117.063.827.000,-. Dari pagu Satker Pusat Rp.275.718.455.000,- sampai dengan periode laporan terdapat alokasi anggaran yang masih di blokir sebesar Rp.2.895.445.000,- dengan rincian per kegiatan sbb

Tabel 1.
Pagu Blokir Bulan Januari
Sesuai DIPA Awal Badan Pangan Nasional
Tahun 2025

URAIAN		PAGU BLOKIR (Rp)
JUMLAH SELURUHNYA		2.895.445.000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.574.765.000
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	331.527.519
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	0
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	51.117.845
WA	Program Dukungan Manajemen	2.077.669.160
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.077.669.160

Laporan Badan Pangan Nasional Periode Bulan Januari Tahun 2025 khusus akan melaporkan pencapaian kinerja Satker Pusat (690590) Badan Pangan

Nasional dengan target pada periode bulan Januari Tahun 2025 setelah dikurangi anggaran yang masih diblokir sebagaimana tersaji pada tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Target Fisik dan Keuangan Bulan Januari Sesuai DIPA Awal
Badan Pangan Nasional Tahun 2025

URAIAN			PAGU NON BLOKIR			TARGET BULAN JANUARI	
			ANGGARAN (Rp)		FISIK	ANGGARAN (5,52%)	FISIK
JUMLAH SELURUHNYA			275.718.455.000			15.219.658.716	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		158.654628.000			8.757.735.466	
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		64.792.789.000			3.576.561.953	
	AEA	Koordinasi	16.103.433.000	8	Kegiatan	888.909.502	
	AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	3.232.364.000	6	Kegiatan	178.426.493	1
	AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan SPHP	2.107.919.000	1	Kegiatan	116.357.129	0
	AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan DCP	10.763.150.000	1	Kegiatan	594.125.880	1
	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3.551.500.000	30	NSPK	196.042.800	
	AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	600.000.000	6	NSPK	33.120.000	0
	AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	951.500.000	10	NSPK	52.522.800	1
	AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	2.000.000.000	14	NSPK	110.400.000	0
	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	9.031.205.000	20	Rekomendasi	498.522.516	

URAIAN		PAGU NON BLOKIR			TARGET BULAN JANUARI		
			ANGGARAN (Rp)		FISIK	ANGGARAN (5,52%)	FISIK
	PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.851.205.000	2	Rekomendas i	102.186.516	0
	PBR 002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.180.000.000	12	Rekomendas i	175.536.000	5
	PBR 003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	4.000.000.000	6	Rekomendas i Kebijakan	220.800.000	2
	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4.250.000.000	52	Klp Masyarakat	234.600.000	
	QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	1.000.000.000	50	Klp Masyarakat	55.200.000	0
	QDD.002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	2.750.000.000	1	Klp Masyarakat	151.800.000	0
	QDD.003	Kios Pangan yang dikembangkan	500.000.000	1	Klp Masyarakat	27.600.000	
	QMA	Data dan Informasi Publik	21.856.651.000	17	layanan, dokumen,	1.206.487.135	
	QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	5.486.346.000	4	Data	302.846.299	
	QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.370.305.000	12	Data	848.440.836	
	QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.000.000.000	1	Data	55.200.000	
	RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000.000	7	Unit	552.000.000	0
	RAG.001	Sarana Logistik Pangan	7.000.000.000	4	Unit	386.400.000	0
	RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.000.000.000	3	Unit	165.600.000	0
	HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	53.577.000.000			2.957.450.400	
	AEA	Koordinasi	11.013.800.000	2	Kegiatan	607.961.760	0

URAIAN		PAGU NON BLOKIR				TARGET BULAN JANUARI	
			ANGGARAN (Rp)		FISIK	ANGGARAN (5,52%)	FISIK
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan		3.981.760.000	1	Rekomendasi	219.793.152	1
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan		7.032.040.000	1	Kegiatan	388.168.608	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		400.000.000	4	NSPK	22.080.000	0
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan		400.000.000	4	NSPK	22.080.000	0
PAD	Peraturan Presiden		440.000.000	1	R.Perpres	24.288.000	0
PAD.001	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)		440.000.000	1	R.Perpres	24.288.000	0
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		6.310.259.000	6	Rekomendasi	348.326.297	0
PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan		1.600.000.000	1	Rekomendasi	88.320.000	0
PBR.004	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan		4.710.259.000	5	Rekomendasi	260.006.297	
QEC	Bantuan Produk		18.983.200.000	66744	Paket	1.047.872.640	
QEC.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan		18.400.000.000	64800	Paket	1.015.680.000	0
QEC.103	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi		583,200,000	1944	Paket	32.192.640	0
QMA	Data dan Informasi Publik		8.888.143.000	3	Data	490.625.494	0
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan		1.000.000.000	1	Data	55.200.000	0

PAGU NON BLOKIR						TARGET BULAN JANUARI	
URAIAN			ANGGARAN (Rp)	FISIK		ANGGARAN (5,52%)	FISIK
	QMA.003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	7.000.000.000	1	Data	386.400.000	0
	QMA.004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	888.143.000	1	Data	49.025.494	
	RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.541.59.,000	10	Unit	416.296.210	
	RAG 001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7.541.598.000	10	Unit	416.296.210	
	HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	40.284.839.000			2.223.723.113	
	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.243.760.000	9	Rekomendas i	68.655.552	2
	ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	9	Rekomendas i	68.655.552	0
	AEA	Koordinasi	17.349.130.000	22	Kegiatan	957.671.976	1
	AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	10	Kegiatan	433.872.000	0
	AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	9	Kegiatan	255.492.096	0
	AEA.003	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	3	Kegiatan	268.307.880	
	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.900.000.000	11	NSPK	104.880.000	
	AFA.001	NSPK Penganekaragaman	600.000.000	3	NSPK	33.120.000	

URAIAN		PAGU NON BLOKIR				TARGET BULAN JANUARI	
		ANGGARAN (Rp)	FISIK	ANGGARAN (5,52%)	FISIK		
		Konsumsi Pangan					
	AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	5	NSPK	55.200.000	
	AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	3	NSPK	16.560.000	
	BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000.000.000	10	UMKM	110.400.000	
	BDG 001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	2.000.000.000	10	UMKM	110.400.000	
	PCA	Perizinan Produk	2.500.000.000	500	Produk	138.000.000	
	PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	500	Produk	138.000.000	0
	PEH	Promosi	3.500.000.000	1	Kegiatan	193.200.000	0
	PEH.001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1	Kegiatan	193.200.000	0
	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.404.489.000	23	Lembaga	132.727.793	0
	QDB 001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.,000	1	Lembaga	49.941.041	
	QDB 002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	1.499.760.000	22	Lembaga	82.786.752	
	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	684.460.000	1	Klp Masyarakat	37.782.192	
	QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	684.460.000	1	Klp Masyarakat	37.782.192	0
	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.998.000.000	1	Laporan	165.489.600	0
	QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1	Laporan	165.489.600	0

URAIAN			PAGU NON BLOKIR			TARGET BULAN JANUARI	
			ANGGARAN (Rp)		FISIK	ANGGARAN (5,52%)	FISIK
	QMA	Data dan Informasi Publik	1.500.000.000	1	Data	82.800.000	0
	QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	1	Data	82.800.000	0
	RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.205.000.000	4	Unit	232.116.000	0
	RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	4	Unit	232.116.000	0
	WA	Program Dukungan Manajemen	117.063.827.000			6.461.923.250	0
	WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	117.063.827.000			6.461.923.250	0
	AEC	Kerja sama	1.224.972.000	1	Dokumen	67.618.454	1
	AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	1.224.972.000	1	Dokumen	67.618.454	1
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	94,699,016,000	15	Layanan	5.227.385.683	6
	EBA.956	Layanan BMN	525.011.000	4	Layanan	28.980.607	4
	EBA.957	Layanan Hukum	1.141.900.000	1	Layanan	63.032.880	1
	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.899.500.000	6	Layanan	160.052.400	6
	EBA.959	Layanan Protokoler	792.600.000	1	Layanan	43.751.520	1
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.934.000.000	1	Layanan	106.756.800	1
	EBA.962	Layanan Umum	8.348.720.000	1	Layanan	460.849.344	1
	EBA.994	Layanan Perkantoran	79.057.285.000	1	Layanan	4.363.962.132	1
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.313.304.000	81	Unit	127.694.381	0
	EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.313.304.000	81	Unit	127.694.381	0
	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.887.686.000	396	Orang	104.200.267	0

URAIAN		PAGU NON BLOKIR			TARGET BULAN JANUARI		
		ANGGARAN (Rp)	FISIK	ANGGARAN (5,52%)	FISIK		
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.887.686.000	396	Orang	104.200.267	0	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	12.328.986.000	40	Dokumen	680.560.027	0	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.129.682.000	12	Dokumen	338.358.446	0	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	3	Dokumen	55.200.000	1	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.945.500.000	1	Dokumen	107.391.600	0	
EBD.965	Layanan Audit Internal	3.253.804.000	24	Laporan	179.609.981	1	
PAD	Peraturan Presiden	440.000.000	1	Rperpres	24.288.000	0	
PAD 001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	440.000.000	1	Rperpres	24.288.000	0	
QMA	Data dan Informasi Publik	3.669.863.000	1	Layanan	202.576.438	1	
QMA 001	Data dan Informasi Pangan	3.669.863.000	1	Layanan	202.576.438	1	
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	500.000.000	1	Sistem Informasi	27.600.000	0	
UAB 001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	500.000.000	1	Sistem Informasi	27.600.000	0	

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Badan Pangan Nasional akan melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp. 329.957.285.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada bulan Januari Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per belanja dan per kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel 3 berikut:

Tabel 3.
Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Lingkup Badan
Pangan Nasional Periode Bulan Januari Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU TOTAL	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1.	Belanja Pegawai	62.254.305.000	1.604.118.317	2,58
2.	Belanja Barang	202.518.846.000	856.196.177	0,42
3.	Belanja Modal	10.945.304.000	0	0,00
TOTAL		275.718.455.000	2.460.314.494	0,89

Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Januari Tahun 2025 untuk satuan kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel 4 berikut

Tabel 4.
Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Januari Tahun 2025
Per Output dan Komponen Satker Badan Pangan Nasional

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI		REALISASI BULAN JANUARI	
		KEUANG AN (Rp)	FISIK	KEUANGAN (5,52%)	FISIK
JUMLAH SELURUHNYA		15.219.658.716		2.460.314.524	16,17
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	8.757.735.466		382.645.364	4,37
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.576.561.953		331.527.519	9,27
AEA	Koordinasi	888.909.502	8 Kegiatan	248.090.112	27,91

TARGET BULAN JANUARI					REALISASI BULAN JANUARI		
URAIAN		KEUANG AN (Rp)		FISIK	KEUANGAN (5,52%)		FISIK
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	178.426.493	6	Kegiatan	25.086.504	14,06	0
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan SPHP	116.357.129	1	Kegiatan	56.361.165	48,44	0
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan DCP	594.125.880	1	Kegiatan	166.642.443	28,05	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	196.042.800	30	NSPK	6.500.000	3,32	0
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	33.120.000	6	NSPK	0	0,00	0
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	52.522.800	10	NSPK	6.500.000	12,38	0
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	110.400.000	14	NSPK	0	0,00	0
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	498.522.516	20	Rekomenda si	53.166.744	10,66	
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	102.186.516	2	Rekomendas i	0	0,00	0
PBR 002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	175.536.000	12	Rekomendas i	53.166.744	30,29	0
PBR 003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	220.800.000	6	Rekomendas i Kebijakan	0	0,00	0
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	234.600.000	52	Klp Masyarakat	0	0,00	0
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	55.200.000	50	Klp Masyarakat	0	0,00	0
QDD.002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	151.800.000	1	Klp Masyarakat	0	0,00	0
QDD.003	Kios Pangan yang dikembangkan	27.600.000	1	Klp Masyarakat	0	0,00	0
QMA	Data dan Informasi Publik	1.206.487.135	17	layanan, dokumen,	23.770.663	1,97	0

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI			REALISASI BULAN JANUARI		
		KEUANG AN (Rp)		FISIK	KEUANGAN (5,52%)		FISIK
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	302.846.299	4	Data	23.770.663	7,85	0
QMA.002	Data dan Informasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	848.440.836	12	Data	0	0,00	0
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	55.200.000	1	Data	0	0,00	0
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	552.000.000	7	Unit	0	0,00	0
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	386.400.000	4	Unit	0	0,00	0
RA.002	Sarana Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	165.600.000	3	Unit	0	0,00	0
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.957.450.400			0	0,00	
AEA	Koordinasi	607.961.760	2	Kegiatan	0	0,00	0
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	219.793.152	1	Rekomendasi	0	0,00	0
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	388.168.608	1	Kegiatan	0	0,00	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	22.080.000	4	NSPK	0	0,00	0
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	22.080.000	4	NSPK	0	0,00	0
PAD	Peraturan Presiden	24.288.000	1	R.Perpres	0	0,00	0
PAD.001	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	24.288.000	1	R.Perpres	0	0,00	0
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	348.326.297	6	Rekomendasi	0	0,00	0

TARGET BULAN JANUARI					REALISASI BULAN JANUARI			
URAIAN		KEUANG AN (Rp)	FISIK		KEUANGAN (5,52%)	FISIK		
PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	88.320.000	1	Rekomendas i	0	0,00	0	
PBR.004	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	260.006.297	5	Rekomenda si	0	0,00	0	
QEC	Bantuan Produk	1.047.872.640	66744	Paket	0	0,00	0	
QEC.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	1.015.680.000	64800	Paket	0	0,00	0	
QEC.103	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	32.192.640	1944	Paket	0	000	0	
QMA	Data dan Informasi Publik	490.625.494	3	Data	0	0,00	0	
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	55.200.000	1	Data	0	0,00	0	
QMA.003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	386.400.000	1	Data	0	0,00	0	
QMA.004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	49.025.494	1	Data	0	0,00	0	
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	416.296.210	10	Unit	0	0,00	0	
RAG 001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	416.296.210	10	Unit	0	0,00	0	
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	2.223.723.113			51.117.845	2,30		
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	68.655.552	9	Rekomendas i	0	0,00	0	
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	68.655.552	9	Rekomendas i	0	0,00	0	
AEA	Koordinasi	957.671.976	22	Kegiatan	4.498.500	0,47	0	

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI			REALISASI BULAN JANUARI		
		KEUANG AN (Rp)		FISIK	KEUANGAN (5,52%)		FISIK
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	433.872.000	10	Kegiatan	3.727.500	0,86	0
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	255.492.096	9	Kegiatan	0	0,00	0
AEA.003	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	268.307.880	3	Kegiatan	771.000	0,29	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	104.880.000	11	NSPK	46.619.345	44,45	0
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	33.120.000	3	NSPK	46.619.345	140,76	0
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	55.200.000	5	NSPK	0	0,00	0
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	16.560.000	3	NSPK	0	0,00	0
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	110.400.000	10	UMKM	0	0,00	0
BDG 001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	110.400.000	10	UMKM	0	0,00	0
PCA	Perizinan Produk	138.000.000	500	Produk	0	0,00	0
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	138.000.000	500	Produk	0	0,00	0
PEH	Promosi	193.200.000	1	Kegiatan	0	0,00	0
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	193.200.000	1	Kegiatan	0	0,00	0

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI				REALISASI BULAN JANUARI		
		KEUANG AN (Rp)		FISIK		KEUANGAN (5,52%)		FISIK
	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	132.727.793	23	Lembaga	0	0,00	0
	QDB 001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	49.941.041	1	Lembaga	0	0,00	0
	QDB 002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	82.786.752	22	Lembaga	0	0,00	0
	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	37.782.192	1	Klp Masyarakat	0	0,00	0
	QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	37.782.192	1	Klp Masyarakat	0	0,00	0
	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	165.489.600	1	Laporan	0	0,00	0
	QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	165.489.600	1	Laporan	0	0,00	0
	QMA	Data dan Informasi Publik	82.800.000	1	Data	0	0,00	0
	QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	82.800.000	1	Data	0	0,00	0
	RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	232.116.000	4	Unit	0	0,00	0
	RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	232.116.000	4	Unit	0	0,00	0
	WA	Program Dukungan Manajemen	6.461.923.250			2.077.669.160	32,15	0
	WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	6.461.923.250			2.077.669.160	32,15	0
	AEC	Kerja sama	67.618.454	1	Dokumen	0	0,00	
	AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	67.618.454	1	Dokumen	0	0,00	0
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.227.385.683	15	Layanan	1.704.847.547	32,61	0
	EBA.956	Layanan BMN	28.980.607	4	Layanan	0	0,00	0
	EBA.957	Layanan Hukum	63.032.880	1	Layanan	8.300.000	13,17	1
	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan	160.052.400	6	Layanan	0	0,00	0

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI			REALISASI BULAN JANUARI		
		KEUANG AN (Rp)		FISIK	KEUANGAN (5,52%)		FISIK
	Informasi						
EBA.959	Layanan Protokoler	43.751.520	1	Layanan	0	0,00	0
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	106.756.800	1	Layanan	12.000.000	11,24	1
EBA.962	Layanan Umum	460.849.344	1	Layanan	61.079.200	13,25	1
EBA.994	Layanan Perkantoran	4.363.962.132	1	Layanan	1.623.468.347	37,20	1
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	127.694.381	81	Unit	0	0,00	0
EBB.951	Layanan Sarana Internal	127.694.381	81	Unit	0	0,00	0
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	104.200.267	396	Orang	0	0,00	0
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	104.200.267	396	Orang	0	0,00	0
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	680.560.027	40	Dokumen	366.561.864	53,86	0
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	338.358.446	12	Dokumen	0	0,00	1
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	55.200.000	3	Dokumen	0	0,00	0
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	107.391.600	1	Dokumen	262.052.900	244,02	0
EBD.965	Layanan Audit Internal	179.609.981	24	Laporan	104.508.964	58,19	0
PAD	Peraturan Presiden	24.288.000	1	Rperpres	0	0,00	0
PAD 001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	24.288.000	1	Rperpres	0	0,00	0
QMA	Data dan Informasi Publik	202.576.438	1	Layanan	6.259.749	3,09	1
QMA 001	Data dan Informasi Pangan	202.576.438	1	Layanan	6.259.749	3,09	1
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	27.600.000	1	Sistem Informasi	0	0,00	0
UAB 001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	27.600.000	1	Sistem Informasi	0	0,00	0

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada output/RO dan komponen lingkup Badan Pangan Nasional posisi bulan Januari Tahun 2025 sebagaimana tabel di atas, realisasi anggaran per bulan Januari Tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan mencapai Rp. 2.460.314.524,- atau 1,28% dari alokasi anggaran satker Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebesar Rp.275.718.455.000,- Sedangkan jika dibandingkan dengan target bulan Januari Tahun 2025 sebesar 5,52% atau setara Rp.15.219.658.716,- realisasi mencapai 16,17%. Realisasi keuangan rincian per kegiatan sebagaimana tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Realisasi Keuangan Bulan Januari Tahun 2025
Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional

URAIAN		KEUANGAN BULAN JANUARI		
		TARGET	REALISASI	
JUMLAH SELURUHNYA		15.219.658.716	2.460.314.524	16,17%
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	8.757.735.466	382.645.364	4,37%
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.576.561.953	331.527.519	9,27%
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.957.450.400	0	0,00%
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	2.223.723.113	51.117.845	2,30%
WA	Program Dukungan Manajemen	6.461.923.250	2.077.669.160	32,15%
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	6.461.923.250	2.077.669.160	32,15%

Dari tabel 5 di atas, realisasi keuangan ter-tinggi pada bulan Januari Tahun 2025 pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional sebesar 32,15%. Capaian tersebut untuk kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Manajemen Kinerja Internal dan Data dan Informasi Publik. Sedangkan realisasi terendah adalah kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan realisasi sebesar 2,30%.

3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Badan Pangan Nasional selama bulan Januari Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Pada periode bulan Januari Tahun 2024, kegiatan prioritas yang tetap dilaksanakan bidang pada tahun ini sebagai berikut:

1.1 Direktorat Ketersediaan Pangan, dengan kegiatan sbb:

1. Penyusunan Proyeksi Neraca Daging Sapi/Kerbau Tahun 2025, dengan hasil sbb:
 - a. Berdasarkan hasil penyusunan updating proyeksi neraca pangan tahun 2024 dan penyusunan proyeksi tahun 2025, terjadi neraca minus di bulan Maret 2025 yang disebabkan oleh angka ketersediaan yang lebih rendah dibandingkan angka kebutuhan.
 - b. Perkiraan produksi daging sapi/kerbau lokal tahun 2025 sebesar 2.094.548 ekor atau 410.322 Ton merupakan produksi daging sapi/kerbau Ditjen PKH Kementan
 - c. Pola konsumsi daging sapi/kerbau di rumah tangga cenderung menurun beberapa tahun terakhir dan kondisi harga tidak bergejolak
 - d. Kebutuhan daging sapi/kerbau 2025 disepakati sebesar 766.968 Ton yang merupakan perkalian angka konsumsi yaitu sebesar 2,696 kg/kapita/tahun dikalikan proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sebesar 284.438.782 jiwa (SP2020 BPS)
 - e. Perkiraan pemotongan sapi/kerbau bakalan impor 2025 sebesar 520.685 ekor atau 141.329 Ton yang terdiri dari stok kandang awal tahun 2025 sebesar 179.674 ekor atau 48.770 Ton dan rencana pemotongan tahun 2025 sebesar 341.011 ekor atau 92.561 Ton dari rencana impor sapi/kerbau bakalan sebesar 350.000 ekor.
 - f. Perkiraan impor daging sapi/kerbau 2025 sebesar 186.715,67 ton terdiri dari daging sapi/kerbau konsumsi regular sebesar 180.000

ton dan daging industry sebesar 6.715,67 ton (berdasar Rakor Menteri 9 Desember 2024).

- g. **Tindak Lanjut:** Bapanas akan memfinalisasi data proyeksi neraca pangan nasional tahun 2025 untuk semua komoditas pangan.
2. Rapat menyusun Draft RPerbadan tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan Pangan yang merupakan amanat dari PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Rapat bertujuan untuk menyusun RPerbadan tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan Pangan yang merupakan amanat dari PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang tertera pada Pasal 73. Hasil rapat sbb:
 - a. RPerbadan tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan Pangan merupakan amanat dari PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang terdapat pada Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74.
 - b. Penyusunan matriks terkait draft RPerbadan Tata Cara Pengawasan Ketersediaan Pangan yang meliputi ruang lingkup kebijakan, subjek pengawasan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, dan sanksi administrasi.
 - c. Ruang lingkup kebijakan pengawasan ketersediaan pangan sesuai PP No. 17 Tahun 2015 Pasal 72 meliputi: perhitungan neraca pangan secara berkala, pengelolaan cadangan pangan nasional, pengendalian jumlah dan jenis pangan pokok yang diimpor, dan pengaturan stok serta distribusi pangan.
 - d. Objek dari ruang lingkup kebijakan terdiri dari Dinas urusan Pangan seluruh wilayah RI, BUMN Pangan, Importir, produsen, serta distributor.
 - e. Subjek dari RPerbadan terdiri dari Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
 - f. Ruang lingkup RPerbadan; meliputi :
 - Perhitungan neraca pangan secara berkala;
 - Pengelolaan cadangan pangan nasional, tersedianya CPP oleh BUMN Pangan (Kepbadan No.51/2024)

- Pengendalian jumlah dan jenis pangan pokok yang diimpor;
 - Pengaturan stok dan distribusi pangan;
 - Mekanisme pelaksanaan pengawasan dari setiap ruang lingkup pengawasan akan dijelaskan lebih lanjut pada setiap pasal sesuai dengan masing-masing poin lingkup pengawasan ketersediaan pangan;
 - Bab pembinaan meliputi sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi oleh seluruh dinas urusan pangan di daerah dengan kewenangan untuk menentukan kriteria setiap pelaku usaha dalam skala besar;
 - Bab Pemantauan dan Evaluasi meliputi pembentukan tim evaluasi dan pemantauan yang dilakukan secara berkala;
 - Bab Sanksi meliputi sanksi administrasi dari pusat kepada pelaku usaha dan dinas urusan pangan yang bertanggungjawab dalam pengawasan ketersediaan pangan sesuai dengan objek pengawasan masing-masing.
- g. Rencana Tindak Lanjut: Akan dilaksanakan rapat lanjutan dalam rangka penyusunan draft RPerbadan tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok.
3. Pertemuan dengan BPS terkait perhitungan kebutuhan pangan, dengan hasil sbb;
- a. Survey Bapok terakhir yang dilakukan oleh BPS adalah Bapok 2019, namun untuk perhitungan proyeksi neraca pangan, BPS menyarankan untuk menggunakan Bapok 2017 dikarenakan survey Bapok yang resmi dilakukan pada tahun 2017.
 - b. Dalam penyusunan proyeksi neraca pangan, data Bapok 2017 digunakan untuk menghitung angka konsumsi/kebutuhan non-rumah tangga. Namun dirasa data Bapok 2017 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini (Tahun 2024).
 - c. BPS menyampaikan asal usul survey kebutuhan non-rumah tangga dilakukan berdasarkan arahan dari pimpinan yang mempertanyakan kebutuhan di level non-rumah tangga dengan menggunakan anggaran dari BKP pada tahun 2011. Lalu pada

tahun 2014 dan 2017 menggunakan anggaran dari BPS dan survey khusus Bapok untuk tahun 2019 dan 2021 tidak ada karena anggaran tidak mencukupi.

d. Survey Bahan Pokok saat ini sudah menjadi tuisi di Bapanas, sehingga BPS menyerahkan kepada Bapanas untuk dapat melakukan survey dan BPS akan mengawal metode survey yang digunakan.

e. Institusi-institusi yang masuk pada survey Bapok diantaranya UMKM dan hotel, asrama, lapas, panti asuhan, dan data rumah tangga dari Susenas.

f. Rencana Tindak Lanjut: Bapanas perlu melakukan survei kebutuhan yang terbaru karena saat ini kewenangan untuk menghitung kebutuhan pangan.

4. Laporan Evaluasi Proyeksi Neraca Pangan tahun 2024 dan Sosialisasi Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025, sbb:

a. Berdasarkan rekap Bimtek Neraca Pangan Wilayah 2024, terdapat 30 Provinsi yang sudah melaksanakan Bimtek dan 8 Provinsi yang tidak melaksanakan Bimtek yaitu Provinsi NTB, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Aceh, Papua Selatan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

b. Progres penginputan laporan proyeksi neraca pangan tahun 2024 di web proyeksi neraca pangan oleh 38 Provinsi yaitu 55% untuk update bulan Desember dan 47% untuk Kab/Kota. Diharapkan untuk provinsi dan kab/kota yang belum menginput dapat segera menginput.

c. Terdapat beberapa poin yang direvisi/ditambahkan pada Juknis Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025 diantaranya:

➤ Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur dan Bupati/Wali kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan dengan membentuk tim yang

ditetapkan/disahkan melalui surat Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota/ Sekretaris Daerah.

- Menjelaskan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan proyeksi neraca pangan, dengan highlight: (i) menyusun juknis peroyeksi neraca pangan oleh masing-masing provinsi dan kabupaten/kota; (ii) membentuk tim penyusunan proyeksi neraca pangan yang di tetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Wali Kota/ Sekretaris Daerah yang terdiri dari OPD terkait.
- Melakukan rapat koordinasi setiap bulan dengan tim penyusun dari OPD terkait untuk update data dan menyepakati data yang akan digunakan dalam setiap bulan.

d. Rencana Tindak Lanjut: Direktorat Ketersediaan Pangan akan mengirimkan surat kepada seluruh Kepala Daerah dan Juknis Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025.

5. Rapat Koordinasi Tim Neraca dengan hasil sbb:

- a. Penyusunan Laporan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2024 (updating data realisasi bulan Desember) dan penyusunan Laporan Proyeksi Neraca pangan update Bulan Januari Tahun 2025.
- b. Finalisasi draft surat permohonan pembentukan tim proyeksi neraca pangan provinsi dan kab/kota ke kepala daerah dan kepala dinas.
- c. Penyusunan matrik rencana pengembangan aplikasi proyeksi neraca pangan Tahun 2025.
- d. Verifikasi data neraca bahan makanan tahun 2024.
- e. Rencana Tindak Lanjut: Surat permohonan pembentukan tim proyeksi neraca pangan provinsi dan kab/kota akan dikirimkan kepada kepala daerah dan kepala dinas.

6. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan di Yogyakarta, dengan hasil sbb:

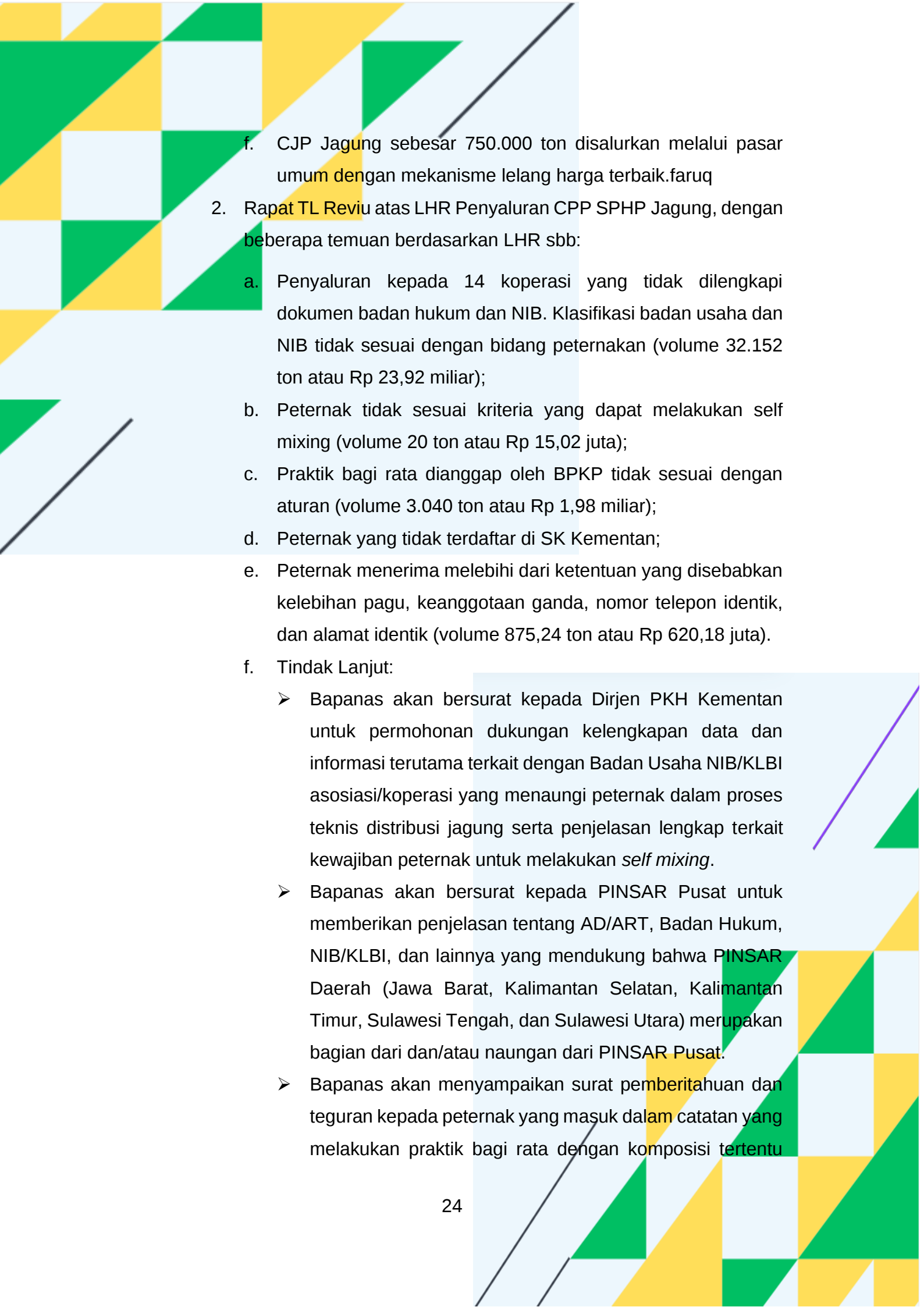
- a. Kondisi kebutuhan dan ketersediaan di Provinsi DIY memiliki karakteristik tersendiri, yaitu:

- Kebutuhan pangan di DIY lebih besar dibandingkan produksi, sehingga membutuhkan barang masuk namun masih belum tergambarkan sepenuhnya. Terutama saat periode HBKN, kebutuhan meningkat karena adanya lonjakan jumlah wisatawan hingga 1,5x dari total penduduk DIY.
 - Barang masuk ke pasar di DIY tidak tersentral, sehingga setiap pasar atau pedagang memiliki pemasok yang berbeda.
- b. Provinsi DIY pernah melakukan kajian terkait Tata Niaga Ketersediaan dan Kebutuhan Provinsi DIY di tahun 2017, yang bekerja sama dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM).
 - c. Provinsi DIY berencana mengadakan kajian terkait cadangan pangan di rumah tangga.

1.2 Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan kegiatan sbb:

A. Regulasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

1. Rapat Koordinasi Terbatas Menteri/Kepala Lembaga Bidang Pangan tentang Pemberlakuan HPP, Penyaluran Bantuan Pangan, dan Pelaksanaan SPHP, dengan hasil sbb:
 - a. Pemberlakuan HPP Gabah dan Beras Rp 6.500/kg mulai 15 Januari 2025;
 - b. Pemberlakuan HPP Jagung Rp 5.500/kg mulai 1 Februari 2025 saat masuk masa panen raya jagung;
 - c. Pemerintah melalui Perum BULOG akan menyerap gabah dan jagung petani yang tidak terserap pasar;
 - d. Bantuan Pangan Beras untuk 16 juta keluarga penerima bantuan pangan ditambah 4 bulan, waktu akan dibahas dalam Ratas bersama Presiden RI;
 - e. Penyaluran SPHP Beras ditambah 1.500.000 ton, SPHP Jagung 250.000 ton, dan SPHP Kedelai 100.000 ton yang diprioritaskan di bulan-bulan defisit, waktu akan dibahas di Ratas bersama Presiden RI; dan

- 
- f. CJP Jagung sebesar 750.000 ton disalurkan melalui pasar umum dengan mekanisme lelang harga terbaik.faruq
 2. Rapat TL Reviu atas LHR Penyaluran CPP SPHP Jagung, dengan beberapa temuan berdasarkan LHR sbb:
 - a. Penyaluran kepada 14 koperasi yang tidak dilengkapi dokumen badan hukum dan NIB. Klasifikasi badan usaha dan NIB tidak sesuai dengan bidang peternakan (volume 32.152 ton atau Rp 23,92 miliar);
 - b. Peternak tidak sesuai kriteria yang dapat melakukan self mixing (volume 20 ton atau Rp 15,02 juta);
 - c. Praktik bagi rata dianggap oleh BPKP tidak sesuai dengan aturan (volume 3.040 ton atau Rp 1,98 miliar);
 - d. Peternak yang tidak terdaftar di SK Kementan;
 - e. Peternak menerima melebihi dari ketentuan yang disebabkan kelebihan pagu, keanggotaan ganda, nomor telepon identik, dan alamat identik (volume 875,24 ton atau Rp 620,18 juta).
 - f. Tindak Lanjut:
 - Bapanas akan bersurat kepada Dirjen PKH Kementan untuk permohonan dukungan kelengkapan data dan informasi terutama terkait dengan Badan Usaha NIB/KLBI asosiasi/koperasi yang menaungi peternak dalam proses teknis distribusi jagung serta penjelasan lengkap terkait kewajiban peternak untuk melakukan *self mixing*.
 - Bapanas akan bersurat kepada PINSAR Pusat untuk memberikan penjelasan tentang AD/ART, Badan Hukum, NIB/KLBI, dan lainnya yang mendukung bahwa PINSAR Daerah (Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara) merupakan bagian dari dan/atau naungan dari PINSAR Pusat.
 - Bapanas akan menyampaikan surat pemberitahuan dan teguran kepada peternak yang masuk dalam catatan yang melakukan praktik bagi rata dengan komposisi tertentu

(Lampung 20%), serta adanya nama ganda, nomor telepon identik, dan alamat identik.

3. Rakor HPP Jagung, dengan hasil sbb:

- a. Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil Rakortas Kemenko Bidang Pangan yang telah dilaksanakan tanggal 6 Januari 2025 terkait pemberlakuan HPP dan Rafaksi di tingkat petani.
- b. Perwakilan Dirjen Tanaman Pangan, Kementan melaporkan berdasarkan data KSA BPS, panen jagung periode Januari – Februari 2025 naik sekitar 1,1 juta ton dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Panen raya jagung akan terjadi pada bulan Maret-April 2025, sehingga Perbadan HPP Jagung diharapkan sudah terbit sebelum panen raya untuk melindungi petani. Selain itu, petani sulit menghasilkan Jagung Kering Pipil (JKP) dengan ka 14% sehingga diperlukan rafaksi untuk memudahkan BULOG dalam melakukan pembelian.
- c. Perwakilan Dirjen PKH Kementan menyampaikan terkait kelengkapan dan pembaharuan data peternak termasuk penambahan data NIK dan KK dengan melakukan verifikasi kembali yang lebih baik secara berjenjang dari dinas di daerah sampai Kementan. Selain itu, perlu dukungan dan rekomendasi dari dinas daerah terkait kebenaran data dari asosiasi/anggotanya yang akan untuk ditetapkan dalam SK Menteri Pertanian tentang BNBA penerima SPHP jagung. Populasi ternak diharapkan harus sesuai dengan kondisi riil di kandang.
- d. Ketua umum GPMT menyampaikan stok saat ini 1,2 juta ton (kebutuhan 48 hari). Usulan HPP Jagung: (a) HPP regional sentra peternak (Medan, Lampung, Jateng, Jatim, Makassar) dan non sentra peternak (Gorontalo dan NTB) dengan pengurangan untuk ongkos distribusi; b) Usulan rafaksi harga

jagung dengan nilai konversi penurunan volume 1,5% yg terdiri dari 1,2% untuk setiap kenaikan 1% ka dan 0,3% susut, benda asing dan kotoran.

- e. Perwakilan Asosiasi/Koperasi/Peternak menyoroti standarisasi dan sensitivitas alat tester kadar air sehingga tidak ada perbedaan ka di petani, BULOG dan pedagang/pabrik pakan. Sertifikasi lulus uji tera perlu menjadi syarat untuk mitra BULOG. Selain itu implikasi terhadap harga di peternak perlu diseimbangkan melalui regulasi Harga jagung di tingkat peternak.
- f. Perwakilan Ombudsman RI menyampaikan usulan di dalam RPerbadan HPP dan rafaksi jagung terkait unsur-unsur partisipasi publik siapa saja yang terlibat. Selain itu, perlu adanya kalibrasi alat ukur kadar air setiap tahun sekali.
- g. Perwakilan BULOG menyampaikan terkait dengan lokasi penetapan harga agar memperhatikan biaya lain-lain hingga adanya penentuan harga gudang BULOG, standar kualitas yang terkait dengan sarpras yang dimiliki oleh BULOG, dan pengukuran kadar air dengan alat yang sudah ditera.
- h. Perwakilan BPS menyampaikan catatan terkait KSA, dimana hasil KSA masih angka sementara (amatan November) untuk amatan desember akan disampaikan 20 Januari 2025, maka produktivitas untuk September-Desember 2024 masih menggunakan angka 5 tahun ke belakang (2019 – 2023).
- i. Perwakilan Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu menyampaikan pemberlakuan HPP di tingkat petani dapat meningkatkan motivasi petani untuk menanam jagung. Selain itu, perhitungan dampak kenaikan harga jagung terhadap inflasi akan disimulasikan menyusul oleh tim BKF.
- j. Perwakilan Sesdukab menyampaikan HPP Jagung sama seperti HPP Gabah ada di petani dan gudang BULOG. Perlu

konsultasi ke Kemenkumham terkait pengaturan melalui Perbadan atau cukup dengan SK Kabadan.

k. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan, KSP menyampaikan bahwa pemberlakuan HPP ditujukan untuk mengatur harga pembelian oleh pemerintah c.q. Badan Pangan Nasional melalui Perum BULOG. Namun, dalam pembuatan regulasi tersebut supaya dibuat lebih komprehensif untuk memitigasi hal-hal teknis yang belum termuat di dalam RPerbadan, seperti kapasitas gudang dan mesin *dryer* yang dimiliki BULOG yang terbatas dan akibatnya terhadap kualitas jagung.

l. Deputi KSP Bapanas menyampaikan perlu penyesuaian Juknis SPHP Jagung terkait keakuratan data peternak. Selain itu, pemberlakuan HPP dan rafaksi jagung akan berlaku untuk pembelian pemerintah, berapapun produksi petani maka akan diserap BULOG, namun mempertimbangkan mekanisme perdagangan secara normal, maka harus ada antisipasi untuk menjaga stabilisasi harga baik di petani maupun di peternak. Oleh sebab itu, momentum ini merupakan kesempatan BULOG bertransformasi untuk pembenahan kapabilitas infrastruktur dan SDM, sehingga mendapat harga yang wajar, untuk CPP produksi dalam negeri.

m. Tindak Lanjut:

- Konsultasi kemenkumham terkait penetapan HPP dan Rafaksi jagung melalui Perbadan atau SK Kabadan.
- Finalisasi perhitungan rafaksi harga jagung.
- Finalisasi pembahasan draf Perbadan/Keputusan Ka Badan tentang HPP dan Rafaksi Harga Jagung.
- Pembahasan dan penetapan regulasi terkait seperti Juknis pengadaan CJP (Pengelolaan CJP) dan Juknis SPHP

Jagung serta Juknis penyaluran CJP melalui mekanisme komersial.

4. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Distribusi Jagung Nasional

- a. Rakornis membahas sistem distribusi jagung dalam rangka persiapan panen raya yang akan segera terjadi di NTB.
- b. Panen raya di NTB diproyeksikan pada bulan Februari, Maret, dan April. Beberapa kendala yaitu gudang di NTB tidak mampu menampung dan terjadi antrian ekspedisi sehingga jagung banyak yang terlambat disalurkan. Selain itu para penyedia jasa logistik menetapkan tarif sendiri sehingga terjadi kenaikan biaya transportasi.
- c. Selain itu saat ini masih terdapat sisa stock jagung di gudang BULOG NTB sebesar 51 ton dan relatif tidak bergerak. Hal ini dikarenakan harga di pasar saat ini Rp 5.300-5.500/kg sehingga harga yang ditawarkan pemerintah sebesar Rp 5.500/kg belum bisa menjadi daya tarik.
- d. Distribusi jagung di NTB dipengaruhi infrastruktur transportasi, selain itu dikarenakan tidak terdapat pabrik pakan, sehingga disarankan adanya perbaikan infrastruktur transportasi serta subsidi transport.
- e. BULOG juga diharapkan segera melakukan distribusi agar dapat mengurangi ruang penyimpanan di gudang BULOG yang terbatas dan tidak terjadi penumpukan di gudang BULOG.
- f. Selain itu perlu memperhatikan *handling* pascapanen agar kualitas jagung sesuai.
- g. Tindak lanjut:
 - Perlu memetakan gudang-gudang yang ada sehingga penyimpanan di gudang dapat dimaksimalkan dan tepat sasaran.

- Perlu menyiapkan alternatif pergudangan selain dari gudang BULOG atau mitra BULOG.
- Perlu memperhatikan teknologi pascapanen jagung agar kualitas jagung sesuai dengan spesifikasi.
- Perlu perbaikan tata kelola distribusi antrian di Pelabuhan agar penyaluran bisa lebih maksimal.
- Akan dilakukan rapat lanjutan di tingkat atas serta kunjungan ke NTB secara langsung.

5. Rakor SPHP Cabai, untuk me perkembangan harga cabai khususnya cabai rawit merah (CRM) dan cabai merah keriting (CMK) yang terus meningkat dan sebagian di atas HAP baik di tingkat produsen dan/atau konsumen serta menindaklanjuti surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Nomor: D-10/RC.310/D.4/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal perkembangan harga cabai, ada kenaikan harga CRM dan CMK yang melewati harga acuan penjualan di Tingkat konsumen karena adanya penurunan pasokan CRM dan CMK yang disebabkan adanya gangguan di sisi produksi sebagai akibat cuaca extrim di berbagai wilayah sentra cabai yang berlangsung selama 1 bulan,

Rekomendasi Tindak Lanjut:

- a. Melakukan koordinasi dengan para petani champion cabai Indonesia
- b. Petani Champion Cabai Indonesia akan meningkatkan koordinasi dengan Pemda untuk penyediaan cabai dengan harga yang lebih murah untuk konsumen langsung.
- c. Bapanas akan mengamati perkembangan harga cabai satu minggu ke depan dan akan mempersiapkan aksi seperti fasilitasi distribusi pangan (FDP) dan penjualan cabai di lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM) apabila harga konsisten naik.

6. Sosialisasi dan Pembahasan Perubahan HPP Gabah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, dengan hasil sbb:

- a. Pembahasan terkait reviu HPP Gabah dan Beras sebelumnya telah dilakukan beberapa kali dengan melibatkan K/L dan Asosiasi/pelaku usaha perberasan. Usulan harga GKP tingkat petani berdasarkan hasil rapat koordinasi pada bulan Desember 2024 rata-rata Rp 6.500 – 7.000/kg.
- b. Melalui pembaruan kebijakan HPP Gabah dan Beras diharapkan kesejahteraan petani meningkat sehingga mendorong minat petani untuk meningkatkan produksinya.
- c. Bentuk regulasi perubahan HPP Gabah dan Beras saat ini dapat berupa Keputusan Kepala Badan dan tidak harus Peraturan Badan, karena sebelumnya sudah diatur dalam Perbadan Nomor 4 Tahun 2024.
- d. Perubahan kebijakan HPP didasarkan dari beberapa hal salah satunya struktur ongkos. Usulan HPP Rp 6.500/kg searah dengan kondisi aktual di lapangan dan sesuai usulan BPS. Kebijakan HPP perlu pertimbangan dan kehati-hatian karena beras berdampak langsung pada inflasi dan juga sebagian petani juga merupakan konsumen beras. HPP Rp 6.500/kg cukup moderat untuk mengakomodir peningkatan kesejahteraan petani dan di sisi lain inflasi di konsumen masih dapat dijaga.
- e. Pemberlakuan HPP Gabah dan Beras yang baru sangat tepat waktunya sebelum panen raya sehingga pelaku usaha dapat mempersiapkan dengan baik perubahan tersebut seperti kesiapan modal dan lainnya. Pemerintah dan asosiasi/pelaku usaha harus menyiapkan strategi agar kenaikan HPP dapat benar-benar dinikmati manfaatnya oleh petani. Diharapkan rendemen beras yang dihasilkan petani bisa lebih besar 56% dengan HPP Rp 6.500/kg agar penggilingan tidak merugi dan

harga beras di gudang Bulog sesuai HET Rp 12.500/kg. Perpadi akan menjalin kerjasama dengan BULOG dalam penyerapan gabah.

- f. Kenaikan HPP dan mensosialisasikan kepada seluruh anggota. Kedepan perlu ada upaya bersama untuk melakukan efisiensi rantai pasok beras karena saat ini banyak middle man. Penetapan harga Rp 6.500/kg perlu diikuti kesiapan kemampuan dan kapasitas kelembagaan penyerapnya (BULOG). Kolaborasi pelaku usaha petani, penggilingan, dan Perum BULOG termasuk akses kredit untuk permodalan. Selain itu, pendistribusian alokasi pupuk khususnya untuk CPCL perlu dioptimalkan dengan pendekatan berbasis peta lahan.
- g. Harus mrmpertimbangkan kembali terkait penetapan kualitas gabah karena kadar hampa 10% untuk HPP GKP Rp 6.500/kg terlalu tinggi, dan akan sulit untuk menghasilkan beras dengan harga Rp 12.000/kg. Diusulkan kadar hampa maksimal 3-5% sehingga rendemen beras dapat lebih besar 56%.
- h. Penerbitan HPP sebelum panen raya sudah tepat. Peningkatan HPP merupakan salah satu instrumen untuk menuju kemandirian pangan sesuai arahan Presiden. Terkait kadar hampa, saat ini di petani berkisar 5 – 10%. Kadar hampa tersebut dipengaruhi kualitas gabah dan mekanisasi pertanian. Jika menggunakan mesin Combine kadar hampa 2 – 5%, mesin tracer 5 – 10%. Selain itu terkait butir patah sebesar 20% perlu dipertimbangkan kembali. Ada kekhawatiran jika harga beras Rp 12.000/kg maka harga beli GKP di bawah HPP. Perlunya Pengawasan implementasi penyesuaian HPP beras.
- i. Penetapan HPP agar dapat diimplementasikan dengan baik perlu disiapkan oleh Pemerintah dan Perum BULOG mengingat saat ini serapan gabah oleh BULOG belum

optimal. Hal yang perlu diantisipasi adalah saat ada keterbatasan serapan penggilingan dan serapan BULOG tidak optimal maka dapat membuat harga di petani jatuh.

j. Tindak Lanjut:

- Perhitungan Rafaksi GKP terkait kadar hampa dari Kementerian Pertanian, BRIN dan pelaku usaha yang dapat menjadi pertimbangan pada reviu HPP Gabah dan Beras berikutnya;
- Proses penetapan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang HPP dan Rafaksi Gabah dan Beras.

7. Sosialisasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Tingkat Konsumen 2025, sbb:

- a. Tahun 2025 Perum BULOG dalam penyaluran beras SPHP harus memperhatikan perkembangan harga komoditas beras pada Panel Harga Pangan khususnya wilayah Timur dan daerah 3TP yang di atas HET (warna merah pada peta Panel Harga Pangan) agar dilakukan penetrasi pasar dengan menambah volume penyaluran.
- b. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan penyaluran beras SPHP, Perum BULOG berkolaborasi dengan Dinas Pangan provinsi/kabupaten/kota agar berkolaborasi dengan OPD lainnya untuk melakukan verifikasi dan validasi data mitra penyaluran beras SPHP 2025 serta melaksanakan penguatan intervensi SPHP Beras untuk memastikan penyaluran beras SPHP sudah sesuai dengan regulasi yang ada.
- c. Pengadaan dan penyaluran SPHP Beras harus tepat waktu, tepat harga dan tepat lokasi mengingat implementasi regulasi HET Beras tidak mudah diterapkan di semua wilayah.
- d. Pelaku usaha pangan berkomitmen mendukung pelaksanaan penyaluran SPHP beras 2025 baik di pengecer maupun retail modern sesuai regulasi yang berlaku.

e. Tindak lanjut:

- Januari minggu ketiga akan dilaksanakan monev bersama terkait penyaluran beras SPHP di wilayah Timur melibatkan K/L dan Pemda (Gubernur, Walikota, Bupati).
- Badan Pangan Nasional akan menyiapkan SK Tim Monev dengan melampirkan titik lokasi dengan mengacu pada informasi perkembangan harga beras pada panel harga pangan.

8. Rakor Tindak Lanjut Kepbadan HPP Gabah dan Beras, dengan hasil sbb:

- a. Berdasarkan Informasi yang dihimpun, data dan informasi panel harga pangan dan informasi lainnya terkait kondisi perkembangan harga gabah/beras di tingkat petani, sehingga perlu disamakan persepsi untuk mengupdate sekaligus upaya mitigasi harga gabah/beras jangan sampai jatuh di petani.
- b. Mengacu pada Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dan rafaksi beras yang mengatur antara lain: kadar air, kadar hampa, derajat sosoh, butir patah (broken) dan lainnya, sampai saat ini belum dapat dipenuhi petani. Oleh karena itu perlu pemberlakuan rafaksi gabah untuk dapat menyerap gabah petani.
- c. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Panel Harga Pangan, beberapa daerah/wilayah dengan harga gabah di bawah HPP (42 kab/kota) dengan variasi sebaran yang sangat beragam. Dinas pangan provinsi/kabupaten/kota agar melakukan konfirmasi data dengan enumerator panel harga pangan di wilayah/lokasi dimaksud untuk menyamakan persepsi penyebab harga gabah dibawah HPP antara lain: jenis, volume, lokasi, kondisi/kualitas gabah, dan hal lainnya.
- d. Tindak Lanjut:

- Data dan informasi dari Dirjen TP Kementan akan disampaikan ke dinas pangan daerah untuk dilakukan klarifikasi dan validasi dengan data dan informasi enumerator yang lebih detail;
- Dinas pangan provinsi/kabupaten/kota perlu melakukan sosialisasi Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025 terkait Perubahan HPP Gabah dan Beras ke Dinas, K/L, dan stakeholder terkait lainnya.
- Akan dilakukan rapat lanjutan untuk membahas dengan data yang lebih lengkap baik oleh dinas maupun berdasarkan data enumerator.

B. Panel Harga Pangan

1. Perkembangan Harga Pangan

Harga rata-rata nasional komoditi tingkat produsen pada Januari 2025 untuk komoditas yang aman yaitu Beras Medium tingkat penggilingan, Cabai Merah Keriting tingkat petani, dan cabai Rawit Merah tingkat petani. Komoditas yang berada pada status waspada yaitu Jagung Pipilan Kering tingkat peternak ($4,86\% < \text{HAP}$), Bawang Merah ($5,88\% < \text{HAP}$), Sapi (hidup) ($7,24\% > \text{HAP}$), Ayam Ras (hidup) ($8,56\% < \text{HAP}$), dan Telur Ayam Ras ($6,45\% < \text{HAP}$). Komoditas yang termasuk intervensi yaitu GKP tingkat petani ($1,86\% < \text{HPP}$), GKG tingkat penggilingan ($5,63\% < \text{HPP}$), dan Kedelai Biji Kering ($14,34\% < \text{HAP}$).

Berdasarkan perkembangan harga komoditas tingkat konsumen yang berada di atas HAP/HET pada M5 Januari 2025, dengan harga rata-rata berada di atas HAP/HET yang menunjukkan mengalami peningkatan pada M5 Januari 2025 terjadi pada komoditas Gula Konsumsi, Cabai Merah Keriting, Beras Premium, dan Beras Medium. Pantauan pada M5 Januari 2025, terdapat 256 Kab/Kota di Atas HET Beras Premium, terdapat 378 Kab/Kota di atas HET Beras Medium, terdapat 287 Kab/Kota di

atas HAP Cabai Merah Keriting, dan terdapat 375 Kab/Kota di atas HAP Gula Konsumsi.

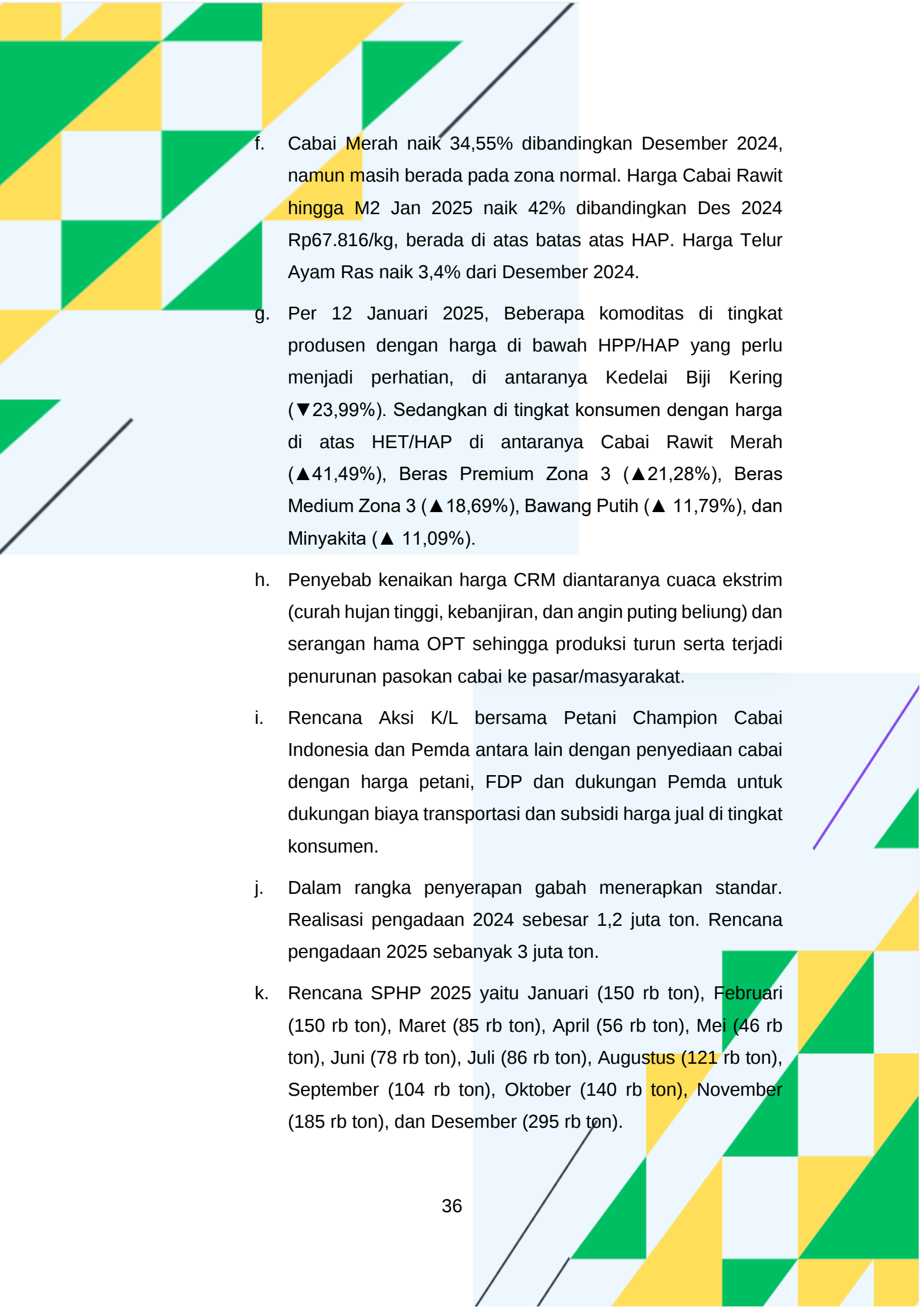
2. Bimbingan Teknis Aplikasi Baru Panel Harga Pangan

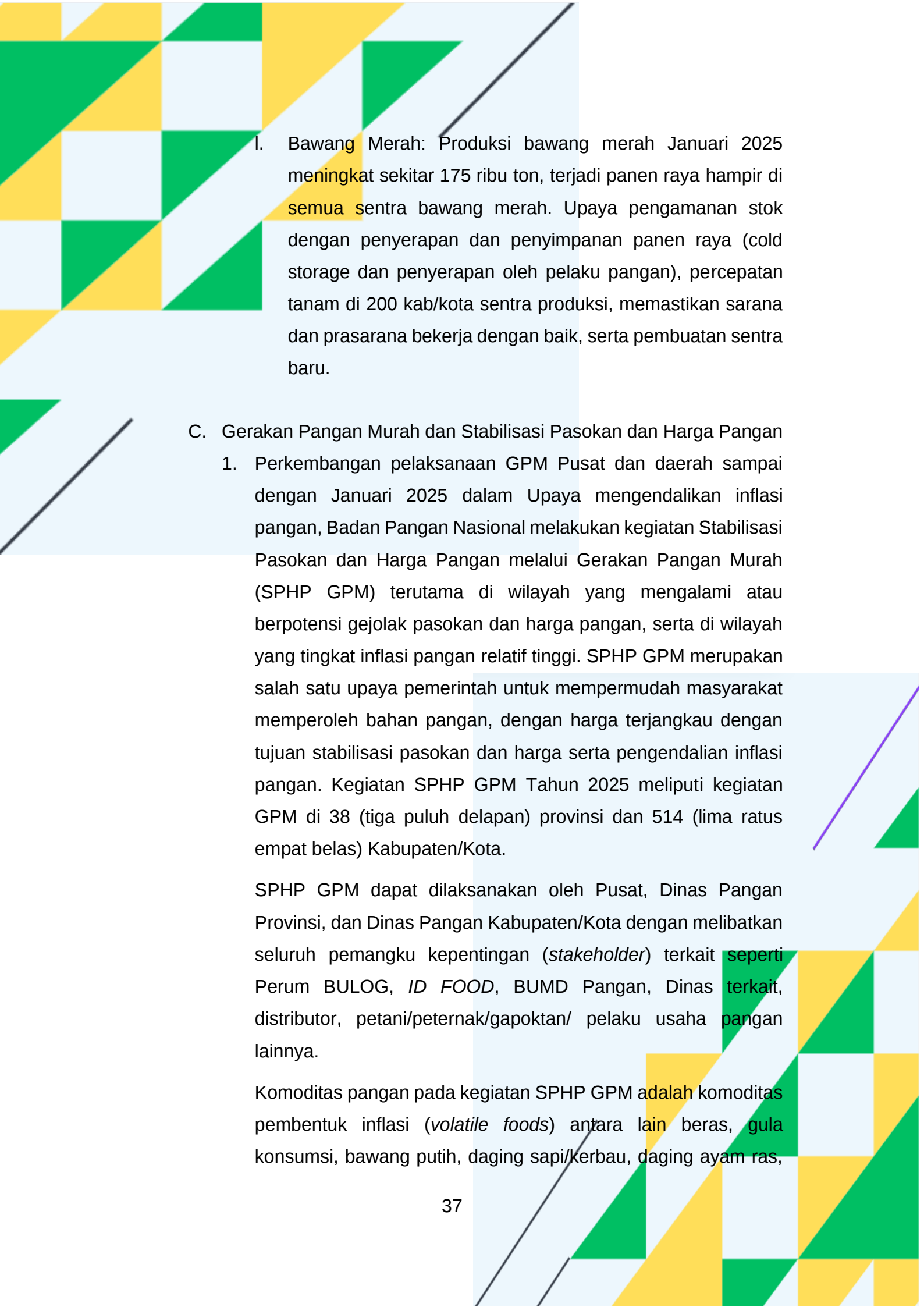
Bimbingan teknis aplikasi baru panel harga pangan dilaksanakan secara daring yang diikuti oleh seluruh petugas verifikator tingkat kab/kota dan petugas enumerator tingkat provinsi.

Kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan dengan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi baru Panel Harga Pangan dan menginventarisir kendala – kendala yang dihadapi oleh petugas verifikator dan enumerator, serta melakukan praktik penginputan harga pangan secara langsung. Beberapa provinsi sudah dapat menginput 100% pada aplikasi baru Panel Harga Pangan yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara.

3. Rakor Inflasi Kemendagri

- a. Inflasi Desember 2024 sebesar 1,57% (yoy), merupakan hasil dari koordinasi setiap pekan rapat pengendalian inflasi.
- b. Perum Bulog agar memprioritaskan penyaluran Beras SPHP di wilayah dengan harga masih tinggi
- c. Komoditas dengan harga tidak aman: Minyakita, Bawang putih, Beras Premium dan Medium Zona 3.
- d. Pada M2 Januari 2025, sebanyak 36 provinsi dan 321 kab/kota mengalami kenaikan IPH dari minggu sebelumnya. Komoditas penyumbang kenaikan IPH yaitu cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras
- e. Kenaikan IPH terbesar di Sumatera oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras), di Jawa oleh cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras dan daerah lainnya cabai rawit, cabai merah, dan Bawang Merah.

- 
- f. Cabai Merah naik 34,55% dibandingkan Desember 2024, namun masih berada pada zona normal. Harga Cabai Rawit hingga M2 Jan 2025 naik 42% dibandingkan Des 2024 Rp67.816/kg, berada di atas batas atas HAP. Harga Telur Ayam Ras naik 3,4% dari Desember 2024.
- g. Per 12 Januari 2025, Beberapa komoditas di tingkat produsen dengan harga di bawah HPP/HAP yang perlu menjadi perhatian, di antaranya Kedelai Biji Kering (▼23,99%). Sedangkan di tingkat konsumen dengan harga di atas HET/HAP di antaranya Cabai Rawit Merah (▲41,49%), Beras Premium Zona 3 (▲21,28%), Beras Medium Zona 3 (▲18,69%), Bawang Putih (▲11,79%), dan Minyakita (▲11,09%).
- h. Penyebab kenaikan harga CRM diantaranya cuaca ekstrim (curah hujan tinggi, banjir, dan angin puting beliung) dan serangan hama OPT sehingga produksi turun serta terjadi penurunan pasokan cabai ke pasar/masyarakat.
- i. Rencana Aksi K/L bersama Petani Champion Cabai Indonesia dan Pemda antara lain dengan penyediaan cabai dengan harga petani, FDP dan dukungan Pemda untuk dukungan biaya transportasi dan subsidi harga jual di tingkat konsumen.
- j. Dalam rangka penyerapan gabah menerapkan standar. Realisasi pengadaan 2024 sebesar 1,2 juta ton. Rencana pengadaan 2025 sebanyak 3 juta ton.
- k. Rencana SPHP 2025 yaitu Januari (150 rb ton), Februari (150 rb ton), Maret (85 rb ton), April (56 rb ton), Mei (46 rb ton), Juni (78 rb ton), Juli (86 rb ton), Agustus (121 rb ton), September (104 rb ton), Oktober (140 rb ton), November (185 rb ton), dan Desember (295 rb ton).

- 
- I. Bawang Merah: Produksi bawang merah Januari 2025 meningkat sekitar 175 ribu ton, terjadi panen raya hampir di semua sentra bawang merah. Upaya pengamanan stok dengan penyerapan dan penyimpanan panen raya (cold storage dan penyerapan oleh pelaku pangan), percepatan tanam di 200 kab/kota sentra produksi, memastikan sarana dan prasarana bekerja dengan baik, serta pembuatan sentra baru.

C. Gerakan Pangan Murah dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1. Perkembangan pelaksanaan GPM Pusat dan daerah sampai dengan Januari 2025 dalam Upaya mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. SPHP GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan. Kegiatan SPHP GPM Tahun 2025 meliputi kegiatan GPM di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota.

SPHP GPM dapat dilaksanakan oleh Pusat, Dinas Pangan Provinsi, dan Dinas Pangan Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait seperti Perum BULOG, *ID FOOD*, BUMD Pangan, Dinas terkait, distributor, petani/peternak/gapoktan/ pelaku usaha pangan lainnya.

Komoditas pangan pada kegiatan SPHP GPM adalah komoditas pembentuk inflasi (*volatile foods*) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras,

dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, dan petani/peternak/poktan/gapoktan. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/ poktan/gapoktan.

Pelaksanaan GPM sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 telah dilaksanakan sebanyak 166 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 5 kali, provinsi sebanyak 13 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 148 kali pelaksanaan.

2. Perkembangan Penyaluran Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg untuk wilayah zona I.
3. Rapat Koordinasi kegiatan Gerakan Pangan Murah dengan hasil sbb:
 - a. Secara keseluruhan, pada tahun 2024 Dinas Pangan di wilayah Jabodetabek telah melaksanakan kegiatan SPHP GPM menggunakan anggaran APBN, APBD dan mandiri/CSR. Rencana tahun 2025 untuk kegiatan SPHP GPM terus dimasifkan dan fokus pada replikasi kegiatan kios pangan baik di Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.
 - b. Mitra vendor dan EO pelaksana kegiatan GPM berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajiban sesuai dengan Petunjuk Teknis SPHP GPM TA 2025.
 - c. Tindak lanjut:
 - Membuat infografis katalog produk-produk mitra vendor GPM sebagai sarana publikasi saat pelaksanaan kegiatan.

- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja mitra vendor GPM dan EO.

D. Mobilisasi Pangan dari Daerah Surplus ke Daerah Defisit

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/packing (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/packing. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar.

Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya.

Pada bulan Januari 2025 penyaluran bahan pangan melalui SPHP FDP difokuskan pada penyusunan Petunjuk Teknis kegiatan dan koordinasi teknis dengan calon pengusul terkait pelaksanaan kegiatan FDP yaitu Surat usulan dari Koperasi Produsen Aslupama Maju Bersama dengan nomor surat 11/KOPASLUPAMA/II/2025 tanggal 6 Januari 2025 untuk komoditas bahan pangan dari gapoktan ke kios pangan.

E. Kios Pangan

1. Perkembangan Kios Pangan Januari 2025

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui outlet Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan.

Keberadaan Kios Pangan diharapkan mampu memangkas rantai pasok distribusi pangan. Dengan memasarkan komoditas pangan

langsung ke Kios Pangan, maka telah memotong rantai distribusi pemasaran sehingga harga dapat dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya. Dalam rangka menjamin kepastian produksi, distribusi dan pemasaran hasil pangan dari sisi produsen serta jaminan kepastian stabilisasi harga dari sisi konsumen, maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terkoordinasi dan terarah sehingga tujuan dari kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Kios Pangan dapat tercapai dan bermanfaat bagi produsen dan konsumen.

Perkembangan Kios pangan per 31 Januari sebanyak 453 Kios Pangan yang tersebar di 31 Provinsi dan 103 Kabupaten/Kota.

2. Coaching Aplikasi Stroberi Kasir

Tujuan *coaching* aplikasi stroberi kasir untuk dapat mengetahui secara menyeluruh terkait fungsi dan penggunaan Aplikasi stroberi kasir sehingga aplikasi ini mampu menjadi sistem pelaporan penjualan/keuangan di kios pangan. *Coaching* dilakukan dengan pemberian materi oleh BRI dan praktek aplikasi stroberi kasir.

Stroberi Kasir merupakan aplikasi *Point Of Sales* (POS) atau aplikasi manajemen kasir berbasis Android yang dikembangkan oleh BRI. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur seperti: (1) mencatat riwayat transaksi, (2) membuat laporan keuangan, (3) membuat order ke supplier, (4) mengelola produk yang akan dijual, (5) Qris, (6) buka tutup kas dan (7) mengawasi dan mengevaluasi tagihan.

Tindaklanjut:

- a. Bapanas perlu bersurat ke BRI terkait data dan kebutuhan untuk diakomodir oleh stroberi kasir serta penyesuaian aplikasi.
- b. PKS penggunaan stroberi kasir untuk mendukung Kios Pangan.

F. Gerakan Aksi Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1. Munas PERPADI 2025 dengan hasil sbb:

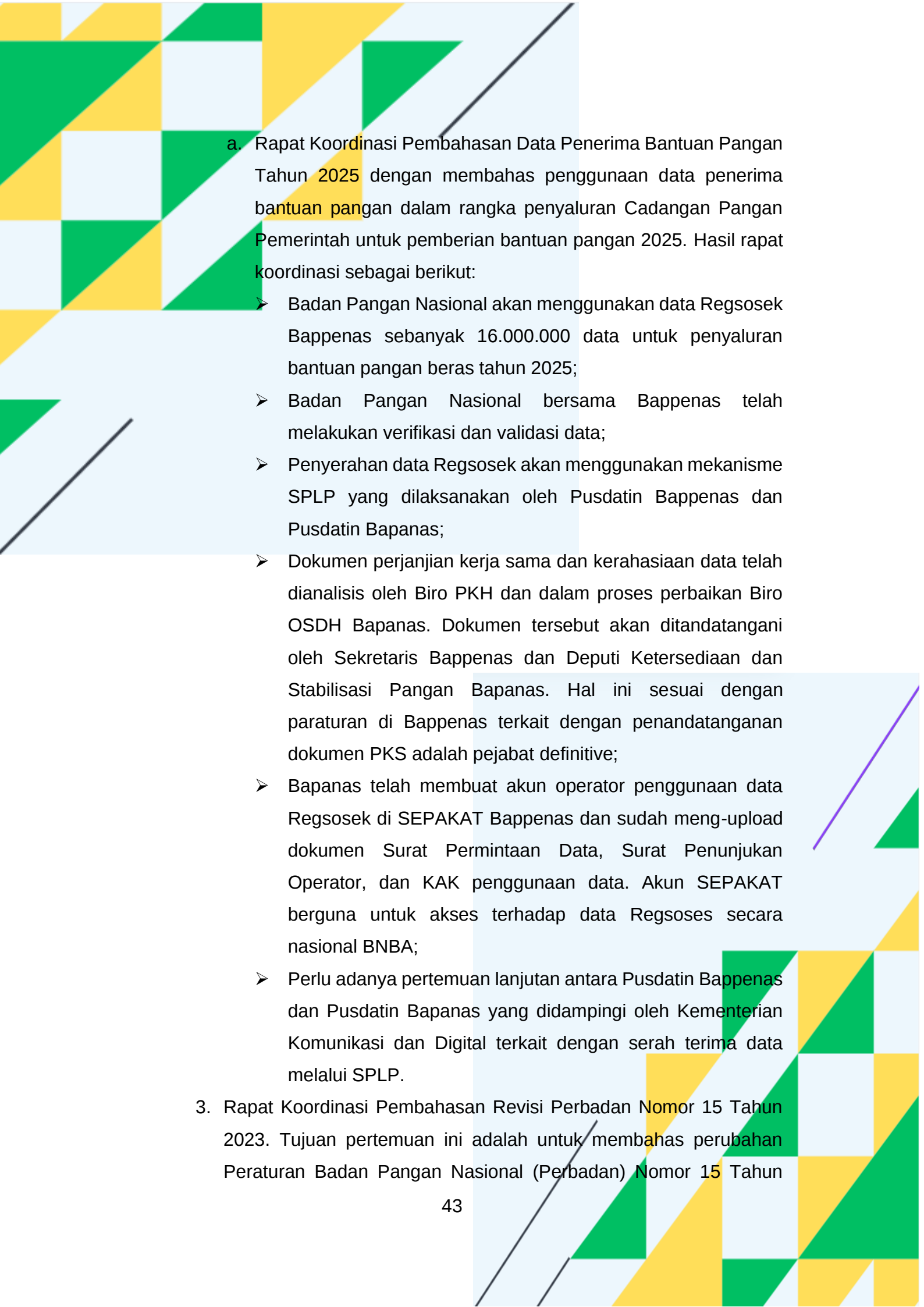
- a. Kegiatan Munas Perpadi tahun 2025 yang diselenggarakan dari tanggal 14-16 Januari 2025 mengangkat tema "Sinergi Perpadi Bersama Pemerintah Mewujudkan Swasembada Pangan Nasional" diharapkan dapat menjadi wadah diskusi dan pemecahan solusi bersama untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi multi pihak, baik dari elemen petani, usaha penggilingan, Perum BULOG, Perusahaan Perberasan, Lembaga Pembiayaan dan Bank, dan Kementerian/Lembaga terkait.
- b. Pengurus Perpadi mengusulkan adanya fasilitasi kredit murah termasuk bantuan dan dukungan pembiayaan usaha khususnya kredit alsintan. Hadirnya kredit murah bagi petani dan usaha penggilingan diyakini dapat meningkatkan produksi dan menampung hasil panen padi-gabah di Indonesia.

1.3. Direktorat Distribusi Cadangan Pangan

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan NSPK dalam rangka penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan meliputi penyusunan Kajian, Grand Desain, Rekomendasi, Peraturan Kepala Badan, Ketetapan Kepala Badan, Dokumen Penugasan, Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Kegiatan, Pedoman, Standart Operating Prosedure (SOP), dan NSPK lainnya. Pada Bulan Januari 2025, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah melaksanakan kegiatan prioritas terkait dengan penyusunan rekomendasi kebijakan distribusi dan cadangan pangan yaitu Finalisasi Penyusunan Studi Klasifikasi Lumbung Pangan Masyarakat. Dokumen tersebut disusun sebagai bagian dari kelengkapan dalam penyusunan indikator penilaian setiap tingkatan

kondisi dan keragaan LPM, dan pelaksanaan penilaian dan pengelompokan LPM sesi dengan kriteria serta penyusunan strategi penguatan dan pengembangan kegiatan LPM pada periode tahun berikutnya. Sedangkan NSPK yang telah disusun selama bulan Januari 2025 yaitu:

- Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 588.1/2024 tentang Tim Pelaksana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Badan Pangan Nasional;
 - Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 3/2025 Juknis Tata Cara Pengadaan CPP 2025;
 - Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1/2025 Juknis DAK Non Fisik 2025;
 - Keputusan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Nomor 1/2025 Juknis Pelaksanaan Penguatan Sarpras Logistik Pangan;
 - Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593/2024 Juknis Bantuan Pangan 2025;
 - Surat Penugasan Kabatan ke Bulog ttg Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2025;
 - ROPAK Lingkup DCP Tahun Anggaran 2025;
 - Perjanjian Kinerja (PK) DIPA Awal Direktur DCP 2025;
 - Draft SK Tim Bantuan Pangan;
 - Draft SK Tim Pemantauan CPP Bencana;
 - Draft SK Tim Pemantauan CPP;
 - Rancangan Revisi Perbadan 15/2023 (Harmonisasi);
 - Rancangan Kepbadan Juknis Tata Cara Lelang untuk Pelepasan CPP;
 - Rancangan UU Perubahan UU 18/2012;
 - Rancangan Surat Perjanjian Bantuan Pangan 2025;
 - Rancangan Adendum Juknis Pelepasan CJP 2025, dan
 - Rancangan Revisi Perpres 125/2022.
2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan

- 
- a. Rapat Koordinasi Pembahasan Data Penerima Bantuan Pangan Tahun 2025 dengan membahas penggunaan data penerima bantuan pangan dalam rangka penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk pemberian bantuan pangan 2025. Hasil rapat koordinasi sebagai berikut:
- Badan Pangan Nasional akan menggunakan data Regsosek Bappenas sebanyak 16.000.000 data untuk penyaluran bantuan pangan beras tahun 2025;
 - Badan Pangan Nasional bersama Bappenas telah melakukan verifikasi dan validasi data;
 - Penyerahan data Regsosek akan menggunakan mekanisme SPLP yang dilaksanakan oleh Pusdatin Bappenas dan Pusdatin Bapanas;
 - Dokumen perjanjian kerja sama dan kerahasiaan data telah dianalisis oleh Biro PKH dan dalam proses perbaikan Biro OSDH Bapanas. Dokumen tersebut akan ditandatangani oleh Sekretaris Bappenas dan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas. Hal ini sesuai dengan peraturan di Bappenas terkait dengan penandatanganan dokumen PKS adalah pejabat definitive;
 - Bapanas telah membuat akun operator penggunaan data Regsosek di SEPAKAT Bappenas dan sudah meng-upload dokumen Surat Permintaan Data, Surat Penunjukan Operator, dan KAK penggunaan data. Akun SEPAKAT berguna untuk akses terhadap data Regsoses secara nasional BNBA;
 - Perlu adanya pertemuan lanjutan antara Pusdatin Bappenas dan Pusdatin Bapanas yang didampingi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital terkait dengan serah terima data melalui SPLP.
3. Rapat Koordinasi Pembahasan Revisi Perbadan Nomor 15 Tahun 2023. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 15 Tahun

2023 tentang Tata Cara Penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Adapun butir-butir penting hasil pertemuan sbb:

- Forum menyetujui usulan perubahan Perbadan 15 Tahun 2023 oleh Bapanas. Perubahan dengan menyisipkan 2 pasal yang menegaskan pengadaan Cadangan beras pemerintah daerah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah, dan penambahan mekanisme penganggaran untuk Cadangan beras pemerintah daerah dapat bersumber dari dana desa.
- Perwakilan Kementerian Desa mengusulkan narasinya sebagai berikut: dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan.
- Rincian penambahan 2 pasal tertera sebagai berikut: Pasal 3A
BAB IV

4. Harmonisasi Rperbadan tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 15 Tahun 2023. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka Harmonisasi Rperbadan tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Pertemuan harmonisasi membahas dan menyepakati hal-hal sbb:

- a. Konsideran menimbang poin a: bahwa untuk memperkuat cadangan beras pemerintah daerah, perlu dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dana desa”
- b. Konsideran menimbang poin b: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
- c. Ketentuan pada Pasal 3A: Pengadaan cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah;
- d. Ketentuan pada Pasal 3B:

- anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan CBPP dan CBPK;
- dana desa untuk mendukung penyelenggaraan CBPD; dan/atau
- sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Ketentuan lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

f. Tindak lanjut dari hasil kesepakatan harmonisasi ini akan diproses lebih lanjut oleh Kemenkumham untuk diundangkan

5. Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, Perbadan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Perbadan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantaun Pangan, serta Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu dan Harga Pembelian Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025 serta sesuai dengan Hasil Rakortas Kemenko Pangan Nomor 084/SES.M.PANGAN/UND/12/2024 tanggal 24 Desember 2024, Badan Pangan Nasional akan melanjutkan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2025 bagi Komoditas Beras sebagai antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan untuk mencegah terjadinya krisis pangan dan gizi, penurunan stunting, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga. Untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan tersebut, Bapanas telah menerbitkan surat penugasan kepada Perum BULOG sesuai dengan Surat Kepala Badan Nomor 515/TS.03.03/K/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras Tahun 2025.

Penugasan tersebut memberikan tugas kepada Perum BULOG untuk melakukan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan pada tahun 2025 berupa Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Beras @10 kg/Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk 16.000.000 PBP dengan waktu penyaluran selama 2 (dua) bulan pada Bulan Januari s.d. Februari 2025. Dapat diinformasikan bahwa data PBP untuk pemberian bantuan beras bersumber dari data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) KemenPPN/Bappenas. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2025 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras.

- 6 Pelaporan Database Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam penguatan cadangan pangan nasional, Badan Pangan Nasional perlu mengintegrasikan pengembangan sistem data dan informasi cadangan pangan sebagai acuan dalam pengambilan langkah strategis guna mendapatkan data terupdate yang objektif secara harian/mingguan/bulanan sebagai landasan penentu kebijakan. Sebagai integrasi data cadangan pangan nasional yang meliputi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Updating database CPP, CPPD, serta CPM/LPM melalui sistem aplikasi web Sigap Nasional yang dilakukan setiap hari oleh Perum BULOG, dan BUMN Pangan serta bulanan/mingguan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan hasil pelaporan yang dikirimkan secara rutin baik secara manual ataupun melalui Aplikasi Web Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional (sigapnasional.badanpangan.go.id).

2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan

2.1 Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, dengan kegiatan antara lain:

1. Rapat Koordinasi Indikator Ketahanan Pangan

Rapat dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan pembahasan terkait data indikator penyusun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional. IKP Nasional yang dihitung oleh Bapanas bersama tim penyusun FSVA lintas K/L dan tim pakar (IPB, UI, UNILA, BPS, STIS, WFP, praktisi). IKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari FSVA yang setiap tahun disusun dalam 3 level analisis. IKP Nasional tersusun dari 12 indikator yang mewakili 3 aspek ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan). Penyusunan IKP/FSVA bertujuan untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi di suatu wilayah pada periode tertentu. Hal ini mengakibatkan adanya keterbatasan dalam merilis data indikator penyusunnya secara real-time, karena beberapa data tersebut baru tersedia setelah tahun berjalan berakhir.

Berdasarkan ketersediaan data indikator penyusun IKP, Tim Kemenko Pangan akan mengevaluasi kembali kemungkinan menjadikan IKP sebagai IKU Kemenko Pangan. Selain itu, Tim Kemenko Pangan juga akan mempertimbangkan pembuatan formulasi khusus yang memungkinkan penghitungan skor ketahanan pangan yang dapat dirilis pada tahun berjalan. Tindak lanjut; yaitu Kemenko Pangan akan berdiskusi internal untuk memperoleh kesepatan atas IKP Nasional sebagai IKU

2. Rapat Koordinasi Komunikasi antara Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO dengan Badan Pangan Nasional, bahwa berdasarkan Perpres 82/2024, salah satu tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO adalah menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Pertemuan ini diharapkan dapat membangun keselarasan komunikasi antara PCO dan Bapanas khususnya terkait kebijakan pangan nasional, khususnya dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Dalam pencapaian target-target Nasional seperti pengendalian inflasi (melalui Banpang Beras CPP, Banpang Stunting, dan SPHP), penguatan CPP dan CPPD, penurunan angka PoU, penurunan daerah rentan rawan pangan, menjamin keamanan dan mutu pangan, serta penyusunan instrumen yang mengukur ketahanan pangan di Indonesia

seperti Peta FSVA, Skor PPH, dan Panel harga pangan serta mengkampanyekan pola konsumsi B2SA dan Food Loss & Waste.

Peran Bapanas dalam mendukung Makan Bergizi Gratis yaitu memetakan dan memastikan ketersediaan bahan pangan (termasuk pangan lokal; melakukan pengawasan terhadap keamanan bahan pangan MBG; dan standar penyimpanan bahan pangan serta promosi dan edukasi pola konsumsi B2SA..

Tindak lanjut;

- a. Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan BGN dalam rangka dukungan Bapanas dalam program MBG khususnya terkait pengawasan keamanan pangan segar terhadap bahan pangan untuk MBG.
 - b. Akan dibuat media komunikasi bersama/chat group, agar jika terdapat kegiatan yang membutuhkan penyampaian/mengkomunikasikan ke publik, dapat berkoordinasi dengan PCO
3. Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan. NSPK yang akan disusun pada tahun 2025 yaitu Petunjuk teknis penyusunan FSVA dan Kesipa siaga Krisis Pangan serta Intervensi pengendalian kerawanan pangan. Pada Januari 2025 telah dilakukan persiapan berupa identifikasi materi untuk penyusunan NSPK yang akan disusun.
 4. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). Pada tahun 2025 penyusunan FSVA menggunakan metodologi dengan indikator baru. Sebagai langkah awal persiapan, telah dilaksanakan beberapa hal yaitu:
 - Pembentukan tim penyusun FSVA tahun 2025 dengan penyampaian surat permohonan usulan menjadi anggota tim kepada K/L terkait yang selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Penyusun FSVA Nasional tahun 2025..
 - Menyampaikan surat permohonan permintaan data kepada terkait indikator FSVA yang baru kepada wali data di maksud.
 - Selain persiapan, dilakukan juga inventarisasi sekaligus merekap hasil penyusunan FSVA 2024 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - Evaluasi capaian kinerja indikator penurunan daerah rentan pangan (kabupaten/kota rentan pangan) hasil analisis penyusunan FSVA

untuk bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah baik tingkat unit kerja eselon I ataupun Badan Pangan Nasional.

2.2 Direktorat kewaspadaan Pangan, dengan kegiatan antara lain: a) Koordinasi, Sosialisasi, Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan, b) penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP), c) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan, d) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan, dan e) Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan

3. Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

3.1 Direktorat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dengan kegiatan antara lain:

Rapat Pemenuhan Gizi Jadi Fokus Sinergi Badan Pangan Nasional Bersama Badan Gizi Nasional.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyinergikan program kerja kedua institusi dalam mempercepat pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, khususnya melalui Kedeputan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional. Program unggulan yang menjadi fokus utama, seperti Pengembangan Usaha Pangan Lokal (PUPL), Skor Pola Pangan Harapan (PPH), program edukasi B2SA Goes to School, dan Rumah Pangan B2SA.

3.2 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, dengan kegiatan antara lain:

1. Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada *electronic Working Group Codex Committee on Contaminants in Foods* untuk menindaklanjuti terbitnya sirkulasi tahap 2 pada *electronic Working Group (eWG) Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)*, Badan Pangan Nasional selaku *Alternate MC* telah menyampaikan masukan Indonesia terkait *draft Code of Practices (CoP)*, yaitu *Revised Code of Practice for The revention and Reduction of*

Aflatoxin Contamination in Peanuts (CXC 55-2004) melalui platform eWG Codex. Masukan posisi Indonesia terhadap dua draft *Code of Practice* (CoP) telah dikirimkan kepada BPOM selaku Koordinator CCCF.

2. Pertemuan dengan *World Food Programme*. Badan Pangan Nasional melaksanakan pertemuan koordinasi dengan *World Food Programme* (WFP) guna merumuskan *Work Plan Table* tahun 2025 untuk menindaklanjuti perjanjian kemitraan dengan WFP tahun 2021-2025. Kerjasama dengan WFP terkait penyusunan standar fortifikasi beras telah dilaksanakan sejak tahun 2024.

Pada tahun 2025 ini Kembali dirumuskan work plan table dengan WFP dalam rangka menyukseskan penyusunan standar fortifikasi beras. Adapun ruang lingkup kerja sama antara lain: dukungan WFP dalam dokumen teknis yang dibutuhkan dalam penyusunan standar; penyelenggaraan pertemuan teknis dalam rangka penyusunan standar; sosialisasi standar beras fortifikasi yang telah disusun dan tidak menutup kemungkinan kerjasama dalam kajian penyusunan standar beras fortifikasi.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah akan dilaksanakan pertemuan untuk penandatanganan *Work Plan Table* NFA-WFP serta pertemuan konsolidasi Komite Teknis 67-11 dalam rangka keberlanjutan penyusunan standar beras fortifikasi.

3. Pertemuan Koordinasi Pelatihan dengan Better Training for Safer Food ngan Better Training for Safer Food – European Union (BTSF EU). Badan Pangan Nasional sebagai *National Contact Point* (NCP) dari BTSF, yaitu program kegiatan yang diinisiasi EU untuk mengorganisir serangkaian pelatihan terkait keamanan pangan, kesehatan tanaman serta kesehatan dan kesejahteraan hewan. Salah satu program kerjasama pelatihan BTSF EU adalah rangkaian pelatihan *Sustained Training Mission* (STM) on *Composite Products* yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2025 di 5 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Vietnam).

Pelatihan ini bertujuan untuk memfasilitasi otoritas kompeten keamanan pangan dan pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang persyaratan keamanan dan mutu, system manajemen mutu dan prosedur lainnya terkait *importasi composite products* ke EU, mengingat bahwa Peraturan EU terkait impor *composite products* telah berdampak signifikan terhadap akses pasar bagi pelaku usaha ekspor negara anggota ASEAN.

4. Rapat Koordinasi Percepatan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Hal penting yang dibahas adalah Pasal 47 ayat 2 terkait Pengawasan Pangan Olahan dan Pasal 50 terkait koordinator *risk analysis* dalam rangka penguatan pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Rapat ini menghasilkan beberapa poin sbb:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyetujui rumusan terkait pasal 47 ayat (2a) terkait pengawasan pangan olahan asal ikan yang diusulkan oleh BPOM. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian belum memberikan persetujuan atas rumusan Pasal 47 ayat (2) tersebut dikarenakan substansi pada Pasal 47 tersebut merupakan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian sehingga akan dilaksanakan pertemuan bilateral antara BPOM dengan Kementerian Pertanian yang akan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk memperoleh kesepakatan.
 - b. Pasal 50 Koordinator *risk analysis* dalam rangka penguatan pengawasan keamanan pangan dimandatkan kepada Kemenko Bidang Pangan dengan ditambahkan rumusan ayat terkait mekanisme koordinasinya serta Permenko Pangan atau regulasi lainnya.
 - c. Jika telah tercapai kesepakatan, maka pengajuan paraf ulang hanya pada Pasal 47 dan Pasal 50.
5. Penetapan PNPS untuk Penyusunan RSNI Beras Fortifikasi Badan Pangan Nasional telah melakukan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kernel Beras Fortifikan yang saat ini telah ditetapkan

menjadi SNI 9314:2024 Kernel Beras Fortifikan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyusunan SNI yang mengatur lebih lanjut terkait persyaratan pencampuran Kernel Beras Fortifikan pada beras hingga menjadi beras fortifikasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pangan Nasional telah melakukan penyampaian usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) tahun 2025 kepada Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui aplikasi SISPK BSN. Usulan PNPS tersebut kemudian ditetapkan menjadi PNPS melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8/KEP/BSN/1/2025 tentang Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2025 pada tanggal 3 Januari 2025.

6. Rapat Persiapan Penilaian Sistem Manajemen Kelembagaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar OKKPD Provinsi Tahun 2025
Rapat Persiapan Penilaian OKKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat serta staf fungsional Direktorat. Rapat dimaksudkan untuk membahas persiapan penilaian sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar untuk 7 OKKPD Provinsi yang akan dinilai pada tahun 2025. Penilaian pemenuhan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar di daerah mempertimbangkan kesiapan, masa berlaku sertifikat, dan sumberdaya lainnya.

3.3 Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, dengan kegiatan antara lain:

- 1) Rapat Tindak Lanjut Pengawasan HBKN

Berdasarkan hasil pengawasan keamanan pangan segar menjelang HBKN 2024, masih ditemukan retail yang belum memiliki SPPB PSAT dan pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan label sesuai dengan Perbadan No 1/2023 tentang Label Pangan Segar, diantaranya belum memiliki izin edar, tidak ada nama dan alamat produsen dan pencantuman klaim yang tidak diperbolehkan dan

menindaklanjuti hal tersebut, Direktur 3.3 menyampaikan surat kepada retail agar melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian, yang mencakup pemenuhan SPPB PSAT, review kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan terhadap pemasok dan melakukan sosialisasi kebijakan perusahaan kepada pemasok.

2). **Rapat Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**

Pengawasan keamanan pangan berupa pengujian keamanan pangan dilakukan terhadap komoditi pangan segar yang memiliki tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi berdasarkan analisa risiko. Pengujian tersebut menggunakan uji cepat rapid test kit. Teknis pelaksanaan pengawasan lebih lanjut akan dijabarkan dalam Manual Pengawasan Keamanan Pangan Segar untuk Mendukung Program MBG. Pasokan bahan pangan untuk Program MBG diharapkan berasal dari : 1) pelaku usaha yang sudah memiliki nomor izin edar/penjaminan keamanan pangan atau pemasok yang sudah memiliki SPPB PSAT; 2) Pasar yang memiliki program keamanan pangan (PAS AMAN, Pasar Sehat, Pasar Aman Berbasis Komunitas); 3) produsen yang diketahui menerapkan praktik budidaya yang baik

4. **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional**

1) **Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas**, melaksanakan kegiatan prioritas antara lain:

a. **Reviu Angka Dasar**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-14/AG/2025 tanggal 21 Januari 2025 hal Permintaan Data Persiapan Reviu Angka Dasar dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA. 2026, Badan Pangan Nasional telah menyampaikan surat Plt Sekretaris Utama Nomor 286/PR.02.01/A.01/2025 tanggal 30 Januari 2025.

Angka Dasar (*Baseline*) TA. 2026 yang diusulkan Badan Pangan Nasional sebesar Rp16.174.832.867.000,- (Enam belas triliun seratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari:

No	Program/Kegiatan	Pagu 2025	Angka Dasar 2026
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	212.893.458.000	16.034.284.776.000
	a. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	87.921.079.000	15.872.408.479.000
	b. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	56.837.000.000	85.045.180.000
	c. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	68.135.379.000	76.831.117.000
2	Program Dukungan Manajemen	117.063.827.000	140.548.091.000
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan	117.063.827.000	140.548.091.000
	Total	329.957.285.000	16.174.832.867.000

- b. Penerbitan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan guna mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Regulasi bertujuan untuk sebagai pedoman yang mengatur penggunaan DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk 50 kabupaten penerima DAK Non Fisik.

- c. Masukan RPJMN 2025-2029

Sehubungan adanya pemutakhiran indikator dan metodologi yang digunakan dalam penghitungan Indeks Ketahanan Pangan Nasional dan peta ketahanan dan kerentanan pangan, yang semula dihitung berdasarkan 9 (sembilan) indikator menjadi 12 (dua belas) indikator,

menimbulkan koreksi atas jumlah dan persentase daerah rentan rawan pangan.

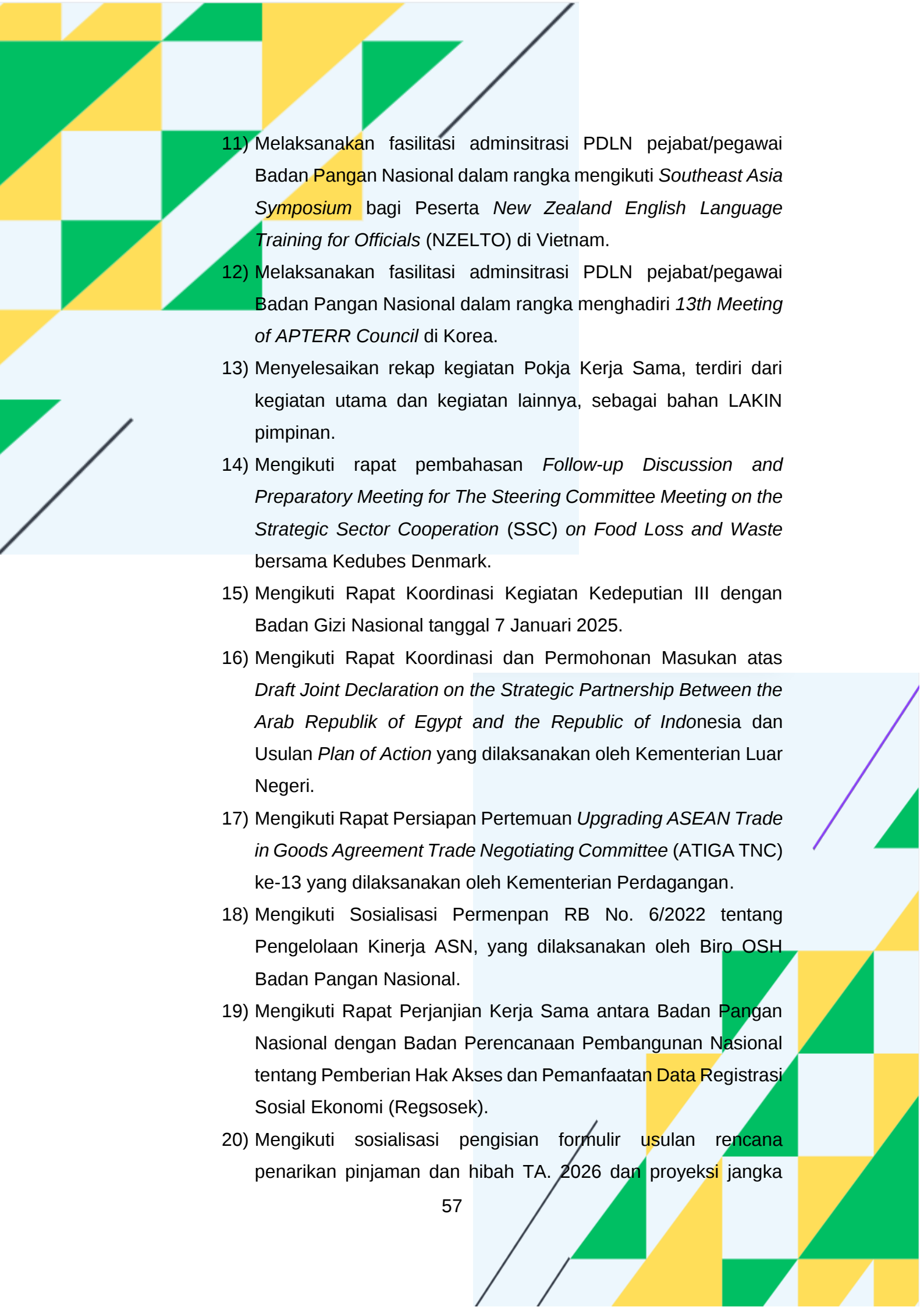
Matrik usulan koreksi atas target Indeks Ketahanan Pangan Nasional dan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang menjadi bagian dari indikator RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Indikator RPJMN	Tahun	Semula	Menjadi
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2025	11,5	16,7
	2026	11	15,6
	2027	10,5	14,6
	2028	10	13,6
	2029	9,5	12,6
Indeks Ketahanan Pangan Nasional	2025	66,22	73,2
	2026	67,09	75,4
	2027	67,96	77,5
	2028	68,83	79,8
	2029	69,7	82,0

- d. Pertemuan Reviu Tindal Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Nomor : 12/LHP/XVII/05/2024
 - e. Pertemuan Penyampaian LHE AKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2024 sebagai bentuk tindak lanjut atas surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor: B/657/AA.05/2024 perihal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pangan Nasional, Tahun 2024.
 - f. Rapat Rencana Kerja Tahun 2025 Tim Penyusun Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Pangan Nasional..
- 2. Kerja Sama Bidang Pangan**, melalui kegiatan:
- 1) Melakukan fasilitasi koordinasi penjajakan Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional untuk tahun 2025.
 - 2) Melakukan review dan memberi masukan atas konsep Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pangan Nasional (NFA) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang

Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

- 3) Melakukan review dan memberi masukan atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional dan PT. Bagus Multikarya Nusantara konsep tentang Kerja Sama Ketersediaan Pangan Strategis untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- 4) Melakukan review dan memberi masukan atas konsep Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dan PT. Super Pasar Rakyat Indonesia tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dalam Kegiatan Distribusi Pangan oleh Operator Pangan dan Mitra Usaha Pangan.
- 5) Melakukan review dan memberi masukan atas konsep Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional dan PINSAR Indonesia tentang Kerja Sama Ketersediaan Pangan Strategis untuk Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan.
- 6) Melakukan review dan memberi masukan atas konsep Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional dan CV. Sedulur Papat Sejahtera tentang Kerja Sama Ketersediaan Pangan Strategis untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- 7) Merespon permintaan luran Tahunan ASEAN Plus Three Rice Reserve (APTER).
- 8) Merespon permintaan Annual Consultation Visit (ACV) ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO).
- 9) Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka mengikuti *BTSF Training on Sampling and Analysis – Mycotoxins* di Spanyol.
- 10) Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka mengikuti *BTSF Training on Sampling and Analysis – Mycotoxins* di Itali.

- 
- 11) Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka mengikuti *Southeast Asia Symposium* bagi Peserta *New Zealand English Language Training for Officials* (NZELTO) di Vietnam.
 - 12) Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka menghadiri *13th Meeting of APTERR Council* di Korea.
 - 13) Menyelesaikan rekap kegiatan Pokja Kerja Sama, terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan lainnya, sebagai bahan LAKIN pimpinan.
 - 14) Mengikuti rapat pembahasan *Follow-up Discussion and Preparatory Meeting for The Steering Committee Meeting on the Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste* bersama Kedubes Denmark.
 - 15) Mengikuti Rapat Koordinasi Kegiatan Kedeputan III dengan Badan Gizi Nasional tanggal 7 Januari 2025.
 - 16) Mengikuti Rapat Koordinasi dan Permohonan Masukan atas *Draft Joint Declaration on the Strategic Partnership Between the Arab Republik of Egypt and the Republic of Indonesia* dan Usulan *Plan of Action* yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri.
 - 17) Mengikuti Rapat Persiapan Pertemuan *Upgrading ASEAN Trade in Goods Agreement Trade Negotiating Committee* (ATIGA TNC) ke-13 yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan.
 - 18) Mengikuti Sosialisasi Permenpan RB No. 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, yang dilaksanakan oleh Biro OSH Badan Pangan Nasional.
 - 19) Mengikuti Rapat Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
 - 20) Mengikuti sosialisasi pengisian formulir usulan rencana penarikan pinjaman dan hibah TA. 2026 dan proyeksi jangka

menengah 2027-2030, yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

- 21) Mengikuti Rapat Koordinasi mengenai Pembahasan Draft *Plan of Action* (PoA) atas *Joint Declaration on the Strategic Partnership* RI-Mesir usulan Indonesia, yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri.
- 22) Memfasilitasi dan melaksanakan pertemuan bersama Dr. Dori Patay, *School of Public Health, Faculty of Medicine and Health, Menzies Centre for Health Policy and Economics, University of Sydney*, dan perwakilan SEAMEO RECFON Universitas Indonesia, terkait pembahasan Penelitian Tata Kelola Sistem Pangan di Indonesia.
- 23) Memfasilitasi audiensi Ikatan Pesantren Indonesia di Badan Pangan Nasional.
- 24) Mengikuti Rapat Koordinasi Usulan Skenario dan Strategi Implementasi Amandemen Kigali yang dilaksanakan oleh KLHK.
- 25) Mengikuti Pertemuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) *Lecture Series* 2025 bersama Prof. Jeffrey Sachs.
- 26) Mengikuti pertemuan pengumpulan data dan informasi, Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Andalas terkait peran “*International Food Law* dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan SDG 2 dan Implementasinya di Indonesia”.
- 27) Mengikuti pembahasan tindak lanjut partisipasi Indonesia pada *School Meals Coalition* (SMC) yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri.

3. Pemberian Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Penyusunan dan penerbitan publikasi cetak melalui majalah bulanan Media NFA Volume 4 Nomor 1, Januari 2025 mengangkat isu utama terkait Serap Gabah Perkuat Stok Cadangan Pangan Pemerintah yang disebarluaskan di lingkup internal dan juga stake holder terkait.

2. Talkshow/ wawancara Kepala NFA di media TV/ Radio pada bulan Januari 2025 sebagai berikut :

06 Januari 2025	Pelita Indonesia Timur	Swasembada Pangan Menuju Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia
10 Januari 2025	RRI Pro-3	Manfaatkan Food Waste dari Program Makan Bergizi Gratis
21 Januari 2025	RRI Pro-3	Strategi NFA Mendukung Swasembada Pangan

3. Pada bulan Januari 2025, NFA telah menerbitkan 27 siaran pers resmi dengan rincian sebagai berikut:
- 21 isu terkait ketersediaan dan stabilitas pangan,
 - 3 isu panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan,
 - 2 isu Stop Boros Pangan dan Kerawanan Pangan dan 1 isu lainnya.
4. Pelayanan informasi publik yang diberikan kepada pemohon informasi publik dan terselesaikan sesuai batas waktu yang dipersyaratkan.
5. Dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden, Badan Pangan Nasional melaksanakan rapat koordinasi komunikasi dengan Kantor Komunikasi Presiden/ Presidential Communication Office (PCO) pada Senin, 13 Januari 2025 di Kantor PCO Jakarta. PCO menggali peran Badan Pangan Nasional berkaitan Program Hasil Terbaik Cepat (PTHC) yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu program Bantuan Pangan (banpang) beras juga menjadi perhatian PCO. Sejauh mana program banpang ini ditengarai bisa memengaruhi kondisi fiskal, serta bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah.

- 2) **Biro Keuangan Pengadaan dan Umum**, dengan kegiatan antara lain;

- a) Rapat persiapan koordinasi verifikasi dan akuntansi keuangan
- b) Rapat persiapan penyusunan laporan keuangan pusat dan daerah
- c) Rapat rekonsiliasi pertanggungjawaban APBN

3) **Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Hukum**, dengan kegiatan antara lain;

1. Rapat Pleno Revisi OTK Badan Pangan Nasional dengan Kementerian PANRB sebagai tindak lanjut hasil Rapat Percepatan Pembahasan Perubahan Kedua Perbadan 2/2022 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional dalam rangka pengendalian kerawanan dan kewaspadaan pangan, perlu dilakukan percepatan penataan organisasi Badan Pangan Nasional melalui Perubahan Kedua atas Perbadan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, dengan tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
2. Rapat Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, Implementasi PermenPANRB 6/2022 di level nasional baru dilakukan pada akhir tahun 2023, sehingga evaluasi implementasi Permenpan baru dilaksanakan pada tahun 2024. Tata cara penetapan predikat kinerja yang terdapat pada Surat Edaran MenpanRB No 3 Tahun 2023 yang dapat dijadikan pedoman atau acuan penetapan pola distribusi dan penetapan predikat kinerja di lingkungan instansi pemerintah Penilaian kinerja berupa nilai akhir dan periodik, untuk periodik dapat dilaksanakan dalam hitungan bulanan atau triwulanan. Setelah dilakukan sosialisasi, telah disusun Nota Dinas kepada unit kerja terkait Penilaian Kinerja / Penetapan predikat kinerja sesuai PermenPANRB 6/2022 dan SE MenPANRB 3/2023.
3. Rapat Reviu dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TW IV Badan Pangan Nasional, Expose nilai RB sementara akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 untuk dan masa sanggah (menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan tidak tercapainya rencana aksi), masa sanggah hasil evaluasi RB dilaksanakan pada tanggal 23 Januari-10 Februari 2025. Capaian TW IV menjadi bagian dari baseline

data penilaian RB Tahun 2025 dan sebagai bukti/tambahan data pada tahap masa sanggah. Timeline evaluasi untuk cut off pengisian nilai Meso oleh K/L dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025, terdapat beberapa indeks yang masih kosong sehingga perlu dikonfirmasi dan dikoordinasikan kepada K/L meso terkait.

4. **Pemutakhiran Data Pegawai** lingkup Badan Pangan Nasional pada Aplikasi SIMASN dan My ASN. Dalam rangka meningkatkan kualitas data kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Badan Pangan Nasional,

4) **Pusat Data dan Informasi**, dengan kegiatan antara lain:

- a) Tata kelola SPBE
- b) Kelola server Pusat Data Nasional
- c) Jaringan internet
- d) Server kendali IT
- e) Helpdesk (SAPA)
- f) Monev integrasi aplikasi
- g) Monitoring system
- h) Backup cloudnesia

5) **Inspektorat**, dengan kegiatan sbb;

- a) **Reviu anggaran belanja tambahan ABT Badan Pangan Nasional TA. 2025**

Reviu dilaksanakan dalam rangka revisi anggaran yang menyebabkan terjadi penambahan pagu anggaran pada BA Badan Pangan Nasional TA. 2025 khususnya satuan kerja Badan Pangan Nasional Pusat (690590) sebesar Rp7.988.607.705.514,-. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan dan penilaian terhadap usulan ABT sebagaimana Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Nomor 1492/PW.02.02/A.1/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Perteuan Tindak Lanjut Reviu usulan ABT Badan Pangan Nasional TA. 2025.

b) Pengukuran Kinerja Inspektorat Tahun 2024 dan Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan (PKPIT) Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka menganalisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), antara lain;

- 1) Tingkat maturitas SPIP
- 2) Tingkat kapabilitas APIP
- 3) Tingkat kepuasan layanan Inspektorat
- 4) Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat layanan ketatausahaan
- 5) Laporan tahunan
- 6) Capaian RB untuk penguatan pengawasan.

Selain pengukuran kinerja, kegiatan lain yang dilaksanakan adalah Analisis Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan (PKPIT) Tahun 2025.

c) Reviu ABT II Badan Pangan Nasional dilaksanakan dalam rangka revisi anggaran yang menyebabkan terjadinya penambahan pagu anggaran pada BA Badan Pangan Nasional TA. 2025 kusunya satker pusat sebesar Rp2.491.024.228.766,06. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan dan penilaian terhadap usulan ABT yang telah diusulkan.

d) Reviu TLHP BPK, PMPRB 2024 dan Pengawasan pengadaan CPNS Badan Pangan Nasional tahun 2025

e) Desk Reviu Bantuan Pangan Tahap III Alokasi Agustus, Oktober dan Desember 2024 dilaksanakan dalam rangka perpanjangan kesempatan bagi Bulog untuk pembayaran Bantuan pangan tahap III. Kegiatan reviu dilaksanakan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut;

- 1) Desk reviu sesi I;
- 2) Penyerahan catatan sementara hasil reviu;
- 3) Uji petik 3 wilayah;
- 4) Desk reviu sesi II;
- 5) Klarifikasi dan konfirmasi.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah desk reviu sesi I dengan penelaahan terhadap dokumen bantuan pangan yang telah disampaikan pada aplikasi banpang.bulog.co.id.

- f) Kegiatan Penjaminan Kualitas (QA) oleh BPKP atas Hasil Reviu Bantuan Pangan Ayam dan Telur Periode Januari 2024 merupakan upaya kolaborasi inspektorat Badan Pangan Nasional dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil dari reviu adalah reviu bantuan pangan ayam dan telur bulan januari 2024. Subtansi pembahasan meliputi proses kerja yang dilaksanakan tim reviu serta bukti dukung dan tanggapan dari Bulog.
- g) Reviu Laporan Kinerja Inspektorat dan Pusdatin Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu dilakukan oleh APIP di intern masing-masing. Output Reviu oleh tim APIP berupa Laporan Hasil Reviu. Cheklist Reviu sebagai kertas kerja serta surat pernyataan telah direviu untuk dilampirkan pada Laporan Kinerja.
- h) Reviu Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAPA Badan Pangan Nasional Tahun 2024 merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.09/20219. Reviu dilakukan sebagai penelaahan atas Pengendalian intern atas Pelporan Keuangan (PIPK) yang dilakukan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern (APIP).
- i) Reviu RKBMN tahun 2025 adalah kegiatan penelaahan atas dokumen atas dokumen perencanaan kebutuhan BMN yang dilakukan oleh APIP K/L. reviu ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap ketentuan perencanaan BMN.
- j) *Entry Meeting* Kegiatan Pengumpulan Data Awal Agenda Prioritas Pengawasan (APP) oleh BPKP
Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data APP melibatkan di Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan kemaritiman dan Deputi Bidang Investasi (Penanggung sektor ketahanan pangan). Informasi yang dibutuhkan dalam APP antara lain;

- 1) Informasi penyaluran SPHP (kuantitas per provinsi dan kab/kota)
- 2) Aturan/acuan Badan Pangan Nasional dari Kementerian Perdagangan dalam menentukan kapan terjadinya gejolak harga;
- 3) Daftar HET yang berlaku untuk 14 komoditas mulai dari tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 7 Maret 2025 (Minggu I Ramadhan (HET HAP)
- 4) Komponen biaya produksi 14 komoditas (update dan kekuarangan bawang merah, bawang putih, minyak goreng, tepung dan daging sapi)
- 5) Kebijakan harga acuan pembelian tingkat produsen (HAPP) terhadap 14 komoditas (update)
- 6) Izin akses neraca pangan
- 7) Kajian/dasar kenaikan HPP Ganah tahun 2025
- 8) Daerah sentra produksi 14 komoditas pangan
- 9) Peta jalur distribusi 14 komoditas pangan
- 10) Pedoman umum dan pedoman teknis GPM, FDP dan Kios Pangan
- 11) Pedoman, Anggran dan Rencana Kerja Kegiatan Fasilitas biaya transportasi (pihak yang menerima bantuan biaya distribusi)
- 12) Laporan Kinerja tahun 2024
- k) Uji Petik Reviu Banpang (Masa Perpanjangan) Tahap III Alokasi Agustus, Oktober dan Desember
Kegiatan reviu dilaksanakan dengan beberapa tahapan antara lain;
 - 1) Desk reviu sesi I;
 - 2) Penyerahan catatan sementara hasil reviu;
 - 3) Uji petik 3 wilayah;
 - 4) Desk reviu sesi II
 - 5) Klarifikasi dan konfirmasi.

3.3 Kegiatan Kepala Badan Pangan Nasional

Kegiatan Kepala Badan Pangan Nasional Selama Bulan Januari Tahun 2025:

1. Menjelang Panen Raya, Gerak Bersama Kejar Target Serapan untuk Perkuat Stok CBP Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, berbagai instrumen kebijakan akan diterapkan untuk mendorong optimalnya serapan gabah oleh Perum



Bulog.

Berdasarkan data Bulog yang dihimpun NFA, per 30 Januari 2025, realisasi pengadaan setara beras yang bersumber dari produksi dalam

negeri telah sampai di angka 8.920 ton. Dengan itu, total stok beras yang dikelola Bulog se-Indonesia mencapai 1,964 juta ton. Stok beras yang dikelola pemerintah, dapat menyeimbangkan kesinambungan hulu sampai hilir melalui upaya penyerapan hasil panen petani, maka harga di tingkat petani dapat terjaga dan inflasi dapat terkendali. Selama tahun 2024 komoditas beras berkontribusi sebesar 0,10 persen dengan frekuensi muncul sampai 6 kali sebagai penyumbang inflasi secara bulanan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen pada Januari dan Februari masing-masing 1,31 juta ton beras dan 2,08 juta ton beras, serta pada Maret diperkirakan akan melonjak menjadi 5,20 juta ton beras. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan produksi beras masih akan surplus seiring musim panen raya di April dan Mei.

Total proyeksi angka tersebut sudah melampaui konsumsi beras bulanan sebesar 2,5 juta ton atau surplus. Dengan total proyeksi produksi 3 bulan pertama di 2025 sebesar 8,59 juta ton dapat memenuhi total kebutuhan konsumsi selama 3 bulan yang diestimasikan berada di 7,77 juta ton. Dengan itu masih terdapat surplus 820 ribu ton untuk triwulan pertama 2025.

2. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendukung pencapaian target serapan gabah/beras Perum Bulog sebesar 3 juta ton, melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 tahun 2025, telah ditetapkan HPP GKP sebesar Rp6.500/kg dan HPP beras di gudang

Perum Bulog
Rp12.000/kg

dengan standar
kualitas yaitu
derajat sosoh
minimal 100
persen yang
kemudian
diperbarui



menjadi 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 25 persen. Kebijakan ini seiring dengan target pencapaian serapan gabah yang diupayakan optimal pada periode panen raya guna memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kerangka swasembada pangan.

Dalam upaya optimalisasi penyerapan musim panen Bulog akan bersinergi dengan petani, Kelompok Tani (Poktan), dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk memastikan serapan optimal. Melalui kerja sama dengan mitra penggilingan akan dilaksanakan oleh Bulog bekerja sama dengan mitra penggilingan untuk mengolah GKP (Gabah Kering Panen) menjadi GKG (Gabah Kering Giling) dan beras guna meningkatkan efisiensi rantai pasok. Pembentukan posko pengadaan di Kanwil dan Kancab Bulog juga dilakukan untuk memperlancar koordinasi dengan mitra pengadaan.

Sedangkan untuk penguatan ekosistem pengadaan terintegrasi dilakukan melalui tim jemput gabah dengan membeli langsung dari petani dan Poktan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan. Pengadaan melalui Mitra Pangan Pengadaan (MPP) dan asosiasi seperti Perpadi dan AB2TI dilakukan guna memastikan distribusi beras sesuai standar nasional. Kemudian mekanisme pembelian dan distribusi dilakukan Bulog dengan

menurunkan personel ke lapangan guna mengawal realisasi target penyerapan. Penyesuaian mekanisme pembelian agar petani dapat menjual gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional.

3. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau Gudang Bulog Bondansari, Kabupaten Pekalongan, untuk memastikan program penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berjalan optimal. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam



menjaga stabilitas pangan nasional, terutama melalui program strategis seperti bantuan pangan beras, operasi pasar, dan penanganan tanggap darurat.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menyoroti tantangan yang dihadapi Bulog terkait kapasitas dan kondisi gudang penyimpanan. “Kita harus memastikan gudang-gudang Bulog dalam kondisi baik dan berfungsi optimal, sehingga mutu beras terjaga. Kalau penyimpanan kurang memadai, tentu akan memengaruhi kualitas dan efektivitas distribusi CBP).

Kepala NFA mengungkapkan bahwa pengelolaan CBP menjadi langkah penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satu program utama yang tengah dilaksanakan adalah bantuan pangan beras kepada 16 juta keluarga penerima manfaat. Dengan alokasi 10 kilogram per penerima setiap bulan selama enam bulan, total kebutuhan beras untuk program ini mencapai 960 ribu ton. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban masyarakat di tengah gejolak harga pangan. Selain itu, operasi pasar melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga harga beras di tingkat konsumen.

4. Kondisi harga pangan pokok strategis mempunyai dampak yang signifikan pada pergerakan inflasi nasional, terutama komponen *volatile food* atau harga bergejolak. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengatur stabilitas harga pangan tersebut agar senantiasa seimbang.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, selama ini pemerintah telah konsisten dalam



menjaga inflasi pangan, sehingga tren inflasi dapat terjaga sehingga tidak mengalami eskalasi.

Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik (BPS), inflasi volatile food atau harga bergejolak secara tahunan di 2023, angka paling tertinggi ada di Februari 2023 di 7,62 persen. Tren itu berulang di 2024 pada Maret 2024 merupakan titik kulminasi dengan 10,33 persen. Ini menandakan bahwa setiap triwulan pertama, inflasi pangan cukup bergejolak. Sementara inflasi pangan secara tahunan di Desember 2024 sendiri berada di angka 0,1 persen. Inflasi pangan tersebut merupakan yang terendah sepanjang 2024 yang juga sempat mengalami deflasi. Sementara secara bulanan pada Desember 2024, inflasi pangan ada di angka 2,04 persen.

Psds tshun 2025, badan pangan Nasional/NFA telah menetapkan kegiatan untuk menjaga stabilisasi dan inflasi pangan. Pertama, optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Januari

dan Februari dengan target 150 ribu ton per bulan. SPHP beras diutamakan ke wilayah yang mengalami disparitas harga tinggi.

Kedua, program bantuan pangan beras yang telah ditetapkan untuk 2 bulan yaitu Januari dan Februari. Dengan jumlah penerima sebanyak 16 juta,

Ketiga, memasifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Januari 2025, diestimasikan akan ada 110 kali GPM yang tersebar di 4 provinsi dan 35 kabupaten/kota. Kemudian langkah terakhir adalah adanya kerja sama antardaerah dalam program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan memperbanyak penyebaran Kios Pangan. Kedua program ini erat kaitannya dengan peran dan inisiasi dari pemerintah daerah.

6. Indonesia memiliki potensi kebencanaan cukup tinggi, sebagai langkah mitigasi kerawanan pangan akibat bencana, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog telah menyiapkan alokasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk membantu kondisi tanggap darurat.

Pada tahun 2024, realisasi penyaluran CPP dalam bentuk beras untuk tanggap darurat telah tersalurkan sebanyak 446 ribu kilogram (kg). Salah satunya untuk membantu penanggulangan bencana dan keadaan darurat



terkait erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah melalui NFA telah menugaskan Bulog untuk menyalurkan beras sejumlah 63.979 kg. Ini diperuntukkan bagi 5.816 jiwa dengan alokasi 250 gram selama 44 hari. Bulog juga diminta mempercepat penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga alokasi bulan Desember, khusus bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki.

7. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) meninjau Pas Aman di Pasar Maricaya, Makassar. Keberadaan Pasar Pangan Segar Aman atau PAS Aman merupakan instrumen penting dalam rangka menjamin keamanan pangan segar untuk masyarakat.

Badan Pangan Nasional bersama Dinas Pangan telah menyiapkan mobil laboratorium keliling untuk mengecek keamanan pangan dengan rapid tes kit yang dapat mendeteksi kandungan pestisida, boraks, dan beberapa zat yang tidak diperkenankan untuk pangan segar.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang mendapat mobil laboratorium keliling pengawasan



keamanan pangan segar. Provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I.Yogyakarta, dan Lampung. Mobil laboratorium keliling ini dilengkapi peralatan seperti rapid test dan reader nya, timbangan analitik serta alat pendukung lainnya. Selain itu, Badan Pangan Nasional tahun 2025 juga akan memperkuat 5 OKKPD (Jatim, Jateng, Lampung, Aceh, Sulsel) dengan laboratorium Uji yang dilengkapi dengan instrumen analisis terbaru, untuk uji residu pestisida dan cemaran logam berat dengan dana alokasi khusus.

Sampai saat ini, PAS Aman telah terrealisasi di 68 lokasi di 20 provinsi. Kehadiran program ini di berbagai wilayah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan keamanan pangan di pasar rakyat.

Penggunaan Rapid Test Kit dan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pangan Segar Terpadu (SIPSAT) juga menjadi bagian dari pengawasan ketat ini. Dengan teknologi ini, kualitas dan keamanan pangan segar dapat dipantau secara efisien dan efektif, sehingga masyarakat dapat yakin akan mutu pangan yang dikonsumsi. Melalui pendekatan ini, setiap pasar rakyat diharapkan mampu mengimplementasikan standar keamanan yang berkelanjutan.

OKKP juga mendukung salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan keamanan pangan segar sebelum diolah. Dalam hal ini dilakukan metode uji cepat terhadap beberapa sampel PSAT yang akan digunakan, dapat segera diketahui tingkat residu terhadap cemaran formalin dan pestisida, selain itu akan dikembangkan mekanisme registrasi pemasok bahan baku tersebut untuk menjamin keamanan pangan dan ketertelusuran.

8. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendampingi Kunjungan kerja Menko Pangan dan Mendag ke Pasar Pa'baeng-Baeng Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah terus menguatkan komitmen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dengan memastikan langsung ke lapangan melalui peninjauan langsung ke pasar untuk



memastikan pasokan pangan di Makassar dan sekitarnya dalam kondisi aman dengan harga terjangkau oleh konsumen.

Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, Sebagian besar harga pangan di Sulawesi Selatan cukup terjangkau bahkan lebih murah dibandingkan sejumlah daerah di Pulau Jawa seperti harga beras premium rerata Rp 16 ribu per kilogram (kg), sedangkan beras medium Rp 14 ribu per kg. Sementara

untuk komoditas daging ayam Rp 35.000 per kg dan telur Rp 28.000 per kg.

Sedangkan harga cabai merah keriting Rp 35.000 per kg sudah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Cabai rawit Rp 50.000 sampai Rp 60.000 per kg dan bawang merah Rp 30.000. Namun demikian, untuk harga Minyak Kita terpantau Rp 17.000 per liter, masih di atas HET sebesar Rp 15.700.

Sebagai salah satu instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Tahun 2025, Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang mengawali peluncuran GPM serentak yang diikuti 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

9. Optimisme pemerintah dalam akselerasi produktivitas gabah dan beras di hulu, penting diselaraskan dengan kesiapan pascapanen. Dalam hal ini, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) menjadi mitra strategis pemerintah dan Perum Bulog.

Untuk itu, pada panen raya padi tahun ini, Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) mengajak PERPADI bergotong royong membantu penyerapan produksi dalam negeri. Ini supaya kalangan petani padi Indonesia bisa terjaga spirit dan kesejahteraannya



Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2025, HPP gabah dan beras telah disesuaikan kembali menjadi lebih baik. Salah satunya HPP beras di Gudang Bulog sebesar Rp 12.000 per kilogram (kg) dengan kualitas derajat

sosok minimal 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2 persen.

Dengan adanya Keputusan Kepala Badan tersebut mengatur penetapan kebijakan HPP gabah dan beras untuk Bulog mulai Maret 2023, turut berimplikasi pada perubahan positif Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP). Seterusnya indeks NTPP tidak pernah kurang dari NTPP Maret 2023 yang kala itu masih berada di angka 103,83.

Dampak tersebut menandakan kebijakan penetapan HPP dari pemerintah cukup efektif dalam memberi perlindungan petani agar semangat "nandur" dan meningkatkan produktivitas. Terlebih di 2025 ini, perkiraan waktu panen raya padi akan mengalami kemajuan dan pemerintah sangat optimis dapat mewujudkan akselerasi produksi beras.

10. Kepala Badan Pangan Nasional mendampingi kunjungan kerja menko Pangan di acara yang dilaksanakan di Kabupaten Subang Jawa Barat oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal yang juga dihadiri



Menteri Pertanian,
Menteri Perdagangan,
Menteri Kelautan dan
Perikanan, Menteri
Lingkungan Hidup,
Menteri Perlindungan
Pekerja Migran
Indonesia, Menteri
Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Staf Kepresidenan, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat terpilih, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Sosial.

Pemerintah yang saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menaruh aspek ketahanan pangan sebagai prioritas utama penunjang perwujudan swasembada pangan. Badan Pangan

Nasional/*National Food Agency* (NFA) turut berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi swasembada pangan tersebut.

Salah satunya melalui penguatan desa sebagai basis utama kemandirian pangan. Sebagai ujung tombak penghasil pangan, desa memegang peranan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan itu, NFA telah memetakan untuk pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Berdasarkan survei klasifikasi LPM yang dilakukan sampai November 2024, total LPM yang aktif di seluruh Indonesia sebanyak 1.751 yang tersebar di 34 provinsi.

Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki jumlah LPM terbanyak kedua secara Nasional. Jumlahnya ada 189 LPM. LPM terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur dengan 337 LPM. Sementara petani yang ada di Kabupaten Subang sendiri telah memiliki program kerja sama 'Mitra Tani' bersama Perum Bulog dengan total luasan mencapai 100 hektare.

LPM sendiri merupakan tempat penyimpanan hasil produksi petani yang dikombinasikan dengan fasilitasi alat dan mesin pengolahan. Ini dibangun untuk memperkuat Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) sebagai bagian dari Cadangan Pangan Nasional. Dengan adanya CPM dapat membantu pada saat terjadi paceklik, fluktuasi harga, dan bencana.

11. Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk menyetop importasi beras yang dilaporkan turut mempengaruhi penurunan harga beras di pasar internasional. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten yang dihelat di Pendopo Gubernur, Serang, Banten.

Berdasarkan data perkembangan harga beras putih 5 persen (*Free on Board*) dari beberapa negara yang dihimpun tim NFA, terlihat rerata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 berada di rentang harga USD 622 sampai 655 per metrik ton.



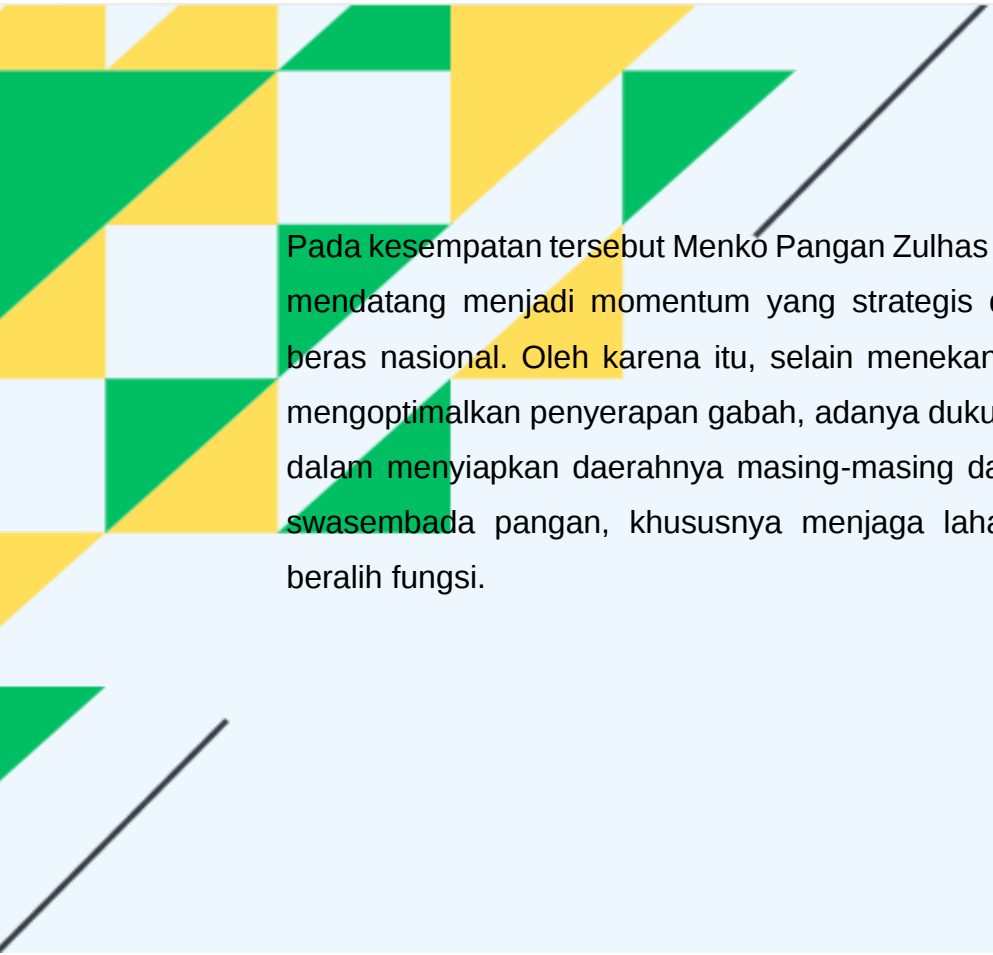
Kemudian per 19 Desember 2024 yang merupakan momen

setelah pengumuman stop impor beras Indonesia, juga mulai menurun di rentang USD 455 sampai 514 per metrik ton. Di bulan ini, India sudah mulai membuka keran eksportnya. Tren harga beras putih pun semakin menurun pada 8 Januari 2025 menjadi rentang USD 430 sampai 490 per metrik ton.

Sementara itu *The FAO All Rice Price Index* (FARPI) menyebutkan Indeks di Desember 2024 menurun 1,2 persen dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 119,2 poin. Namun dilihat secara setahun penuh, rerata indeks FARPI di 2024 masih lebih tinggi 0,8 persen dibandingkan tahun 2023.

Kesejahteraan petani padi dapat tercermin dari perkembangan indeks Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP). NTPP di Februari 2024 yakni 120,30 menjadi paling tinggi dibandingkan NTPP bulan-bulan sebelumnya selama 5 tahun terakhir. NTPP di Desember 2024 pun cukup baik dengan masih menorehkan lebih dari 100 dengan angka 108,90.

Sementara kondisi di hilir juga cukup baik dengan inflasi yang terus dijaga dan dikendalikan Pemerintah. Tingkat inflasi umum secara tahunan di 2024 menjadi yang terbaik sejak tahun 1958 dengan raihan 1,54 persen. Terkendalnya tingkat inflasi disebut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satunya dipengaruhi penurunan harga komoditas pangan yang lebih stabil selama 2024 dalam 2 tahun terakhir.



Pada kesempatan tersebut Menko Pangan Zulhas mengatakan, panen raya mendatang menjadi momentum yang strategis dalam memperkuat stok beras nasional. Oleh karena itu, selain menekankan Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah, adanya dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan daerahnya masing-masing dalam rangka mendukung swasembada pangan, khususnya menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.

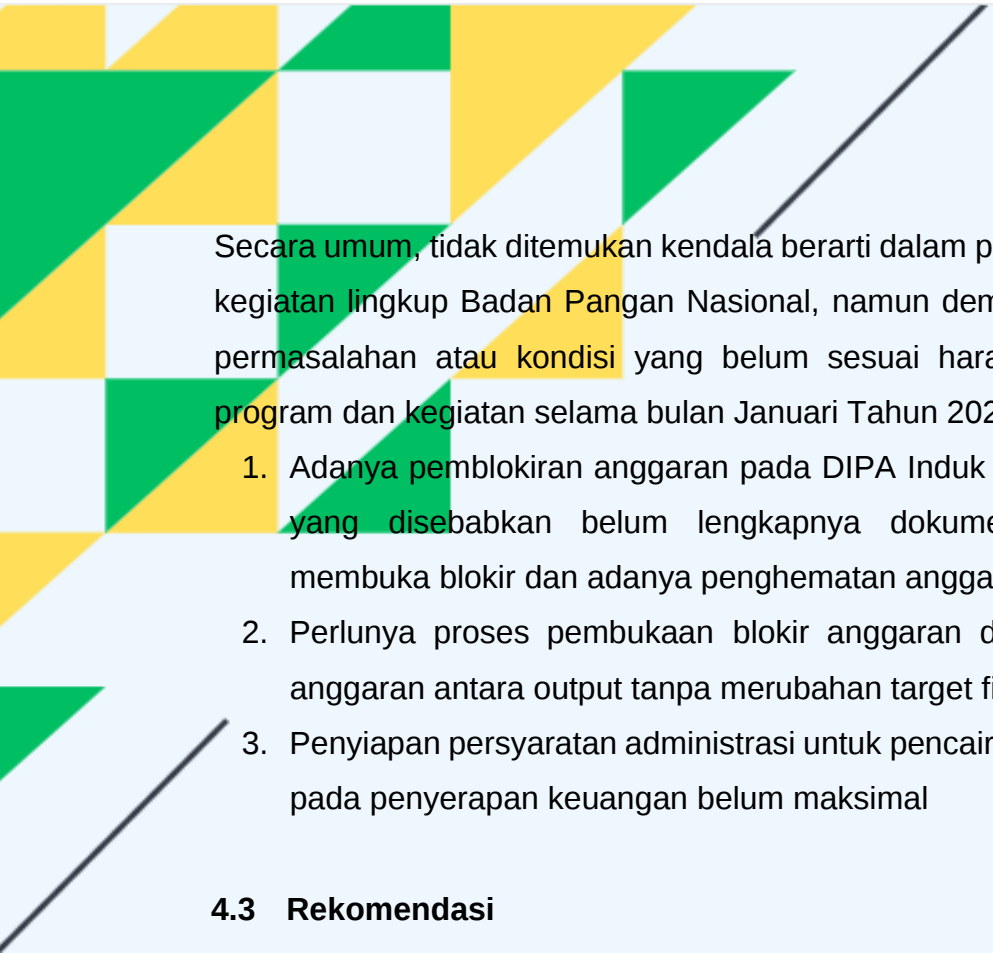
BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Badan Pangan Nasional melaksanakan 2 (dua) program yaitu: Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan 63 output/RO berdasarkan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 329.957.285.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
2. Realisasi keuangan pada bulan Januari Tahun 2025 sebesar Rp. 2.460.314.494,- atau 16,17% dari target Badan Pangan Nasional. Realisasi selain untuk pembayaran gaji dan tunjangan selama bulan Januari 2025 juga dalam persiapan pelaksanaan kegiatan periode selanjutnya.
3. Pelaksanaan kegiatan Badan Pangan Nasional selama bulan Januari Tahun 2025 tetap dilakukan terutama penguatan koordinasi untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan terutama kondisi tingginya harga pangan pokok yang berdampak tingginya inflasi pangan bergejolak atau *volatile food*.
4. Dinamika yang terjadi terhadap dokumen anggaran selama bulan Januari Tahun 2025 adanya anggaran yang masih diblokir sebesar Rp.2.895.445.000,-. Sehingga total pagu non blokir yang dipertanggungjawabkan pada periode laporan ini sebesar Rp.275.718.455.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

4.2 Permasalahan

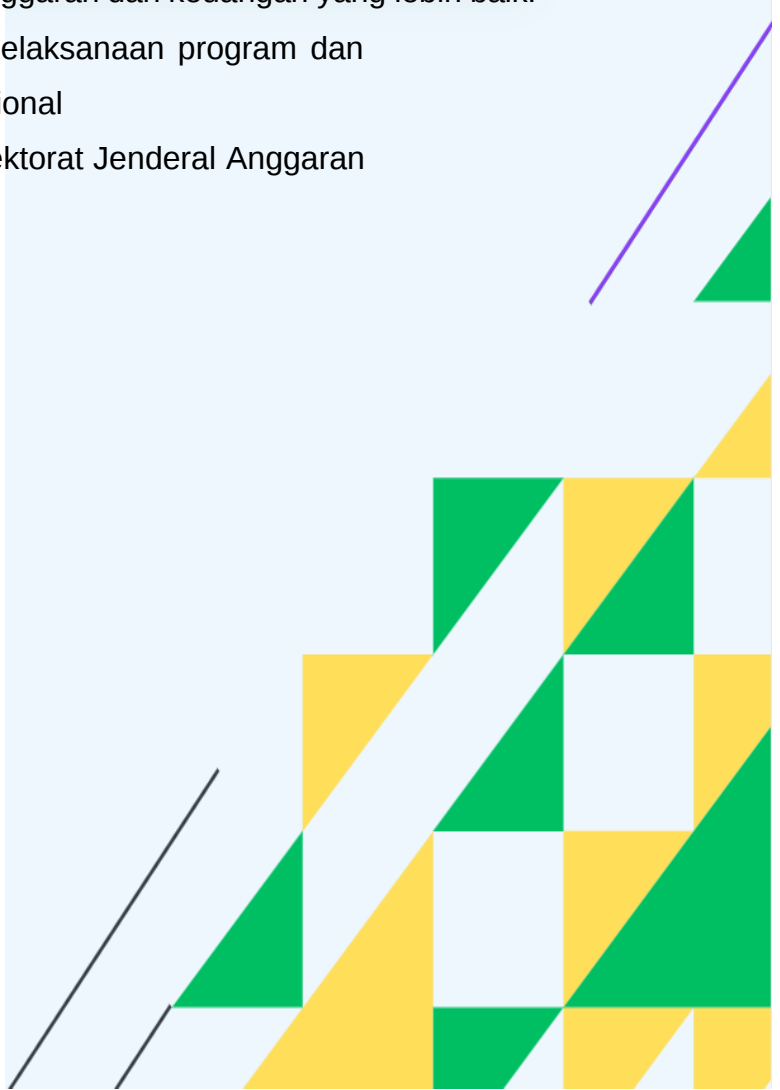


Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional, namun demikian terdapat beberapa permasalahan atau kondisi yang belum sesuai harapan pada pelaksanaan program dan kegiatan selama bulan Januari Tahun 2025, yaitu:

1. Adanya pemblokiran anggaran pada DIPA Induk Badan Pangan Nasional yang disebabkan belum lengkapnya dokumen perencanaan untuk membuka blokir dan adanya penghematan anggaran;
2. Perlunya proses pembukaan blokir anggaran dan perpindahan alokasi anggaran antara output tanpa merubah target fisik kegiatan;
3. Penyiapan persyaratan administrasi untuk pencairan keuangan berdampak pada penyerapan keuangan belum maksimal

4.3 Rekomendasi

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan ke depan, Badan Pangan Nasional akan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penyiapan dokumen perencanaan, anggaran dan keuangan yang lebih baik.
 2. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional
 3. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- 

Lampiran 1.
Lampiran III DIPA Awal Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-125.01-0/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2880-7567-8409-8273

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 125 BADAN PANGAN NASIONAL
2. UNIT ORGANISASI : 125.01 BADAN PANGAN NASIONAL
3. PAGU : Rp.329.957.285.000
(TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM (dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	125.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas													
		RENCANA PENARIKAN DANA	212.893.458	9.439.481	10.172.081	10.172.081	10.172.081	20.111.210	20.111.210	20.211.210	20.211.210	27.111.210	23.711.210	20.711.210	20.759.265
2	125.01.WA	Program Dukungan Manajemen													
		RENCANA PENARIKAN DANA	117.063.827	5.787.684	5.807.684	5.837.684	5.837.684	11.665.369	11.665.369	11.665.369	11.675.369	11.675.369	11.675.369	11.798.409	11.972.469
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	329.957.285	15.227.165	15.979.765	16.009.765	16.009.765	31.776.579	31.776.579	31.876.579	31.886.579	38.786.579	35.386.579	32.509.619	32.731.735
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pangan Nasional



Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c)
NIP. 197411272022211004

Lampiran 2.
Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Januari Tahun 2025 Sesuai Aplikasi SAKTI
Kementerian Keuangan

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI		SISA ANGGARAN	
		PAGU DIPA AWAL	JANUARI 5,52%	JANUARI	S.D JANUARI	(%)	
Jumlah Seluruhnya		275.718.455.000	15.219.658.716	2.460.314.524	2.460.314.524	1,28	189.519.912.476
125.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	158.654628.000	8.757.735.466	382.645.364	382.645.364	0,44	87.395.110.636
HA 6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	64.792.789.000	3.576.561.953	331.527.519	331.527.519	0,70	47.149.228.481
AEA	Koordinasi	16.103.433.000	3.576.561.953	248.090.112	248.090.112	2,76	8.731.709.888
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	3.232.364.000	178.426.493	25.086.504	25.086.504	1,51	1.681.709.496
AEA 002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.107.919.000	116.357.129	56.361.165	56.361.165	4,05	1.336.592.835
AEA 003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	10.763.150.000	594.125.880	166.642.443	166.642.443	2,83	5.713.407.557

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI		SISA ANGGARAN	
		PAGU DIPA AWAL	JANUARI 5,52%	JANUARI	S.D JANUARI	(%)	
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3.551.500.000	196.042.800	6.500.000	6.500.000	0,31	2.108.288.000
AFA 001	NSPK Ketersediaan Pangan	600.000.000	33.120.000	0	0	0,00	600.000.000
AFA 002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	951.500.000	52.522.800	6.500.000	6.500.000	0,96	668.675.000
AFA 003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	2.000.000.000	110.400.000	0	0	0,00	2.000.000.000
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	9.031.205.000	498.522.516	53.166.744	53.166.744	0,88	6.021.546.256
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.851.205.000	102.186.516	0	0	0,00	1.402.855.000
PBR 002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.180.000.000	175.536.000	53.166.744	53.166.744	2,41	3.180.000.000
PBR 003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	4.000.000.000	220.800.000	0	0	0,00	4.000.000.000
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4.250.000.000	234.600.000	0	0	0,00	4.250.000.000
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	1.000.000.000	55.200.000	0	0	0,00	1.000.000.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI		SISA ANGGARAN	
		PAGU DIPA AWAL	JANUARI 5,52%	JANUARI	S.D JANUARI	(%)	
QDD.002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	2.750.000.000	151.800.000	0	0	0,00	2.750.000.000
QDD.003	Kios Pangan yang dikembangkan	500.000.000	27.600.000	0	0	0,00	500.000.000
QMA	Data dan Informasi Publik	21.856.651.000	1.206.487.135	23.770.663	23.770.663	0,15	16.320.135.337
QMA 001	<i>Data dan Informasi Ketersediaan Pangan</i>	5.486.346.000	302.846.299	23.770.663	23.770.663	0,53	4.485.805.337
QMA 002	<i>Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	15.370.305.000	848.440.836	0	0	0,00	15.370.305.000
QMA 003	<i>Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan</i>	1.000.000.000	55.200.000	0	0	0,00	1.000.000.000
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000.000	552.000.000	0	10.000.000.000	0,00	10.000.000.000
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	7.000.000.000	386.400.000	0	0	0,00	7.000.000.000
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.000.000.000	165.600.000	0	0	0,00	3.000.000.000
HA 6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	53.577.000.000	2.957.450.400	0	0	0,00	53.577.000.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		PAGU DIPA AWAL	JANUARI 5,52%	JANUARI	S.D JANUARI	(%)	
AEA	Koordinasi	11.013.800.000	607.961.760	0	0	0,00	11.013.800.000
AEA 001	<i>Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan</i>	3.981.760.000	219.793.152	0	0	0,00	3.981.760.000
AEA 003	Koordinasi, Sosialisasi, Koordinasi, Sosialisasi, Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	7.032.040.000	388.168.608	0	0	0,00	7.032.040.000
AFA	<i>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</i>	400.000.000	22.080.000	0	0	0,00	400.000.000
AFA 001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	22.080.000	0	0	0,00	400.000.000
PAD	Peraturan Presiden	440.000.000	24.288.000	0	0	0,00	440.000.000
PAD.001	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	440.000.000	24.288.000	0	0	0,00	440.000.000
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	6.310.259.000	348.326.297	0	0	0,00	6.310.259.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI		SISA ANGGARAN	
		PAGU DIPA AWAL	JANUARI 5,52%	JANUARI	S.D JANUARI	(%)	
PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.600.000.000	88.320.000	0	0	0,00	1.600.000.000
PBR.004	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	4.710.259.000	260.006.297	0	0	0,00	4.710.259.000
QEC	Bantuan Produk	18.983.200.000	1.047.872.640	0	0	0,00	18.983.200.000
QEC.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	18.400.000.000	1.015.680.000	0	0	0,00	18.400.000.000
QEC.103	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583,200,000	32.192.640	0	0	0,00	583,200,000
QMA	Data dan Informasi Publik	8.888.143.000	490.625.494	0	0	0,00	8.888.143.000
QMA 001	<i>Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan</i>	1.000.000.000	55.200.000	0	0	0,00	1.000.000.000
QMA 002	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	7.000.000.000	386.400.000	0	0	0,00	7.000.000.000
QMA.003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	888.143.000	49.025.494	0	0	0,00	888.143.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI		SISA ANGGARAN	
		PAGU DIPA AWAL	JANUARI 5,52%	JANUARI	S.D JANUARI	(%)	
QMA.004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	7.541.59.,000	416.296.210	0	0	0,00	7.541.59.,000
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.541.598.000	416.296.210	0	0	0,00	7.541.598.000
RAG 001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7.541.598.000		0	0	0,00	7.541.598.000
HA 6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	40.284.839.000	2.223.723.113	51.117.845	51.117.845	0,18	28.340.282.155
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.243.760.000	68.655.552	0	0	0,00	1.243.760.000
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	68.655.552	0	0	0,00	1.243.760.000
AEA	Koordinasi	17.349.130.000	957.671.976	4.498.500	4.498.500	0,04	11.623.718.500
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	433.872.000	3.727.500	3.727.500	0,08	4.464.502.500
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan	4.628.480.000	255.492.096	0	0	0,00	4.628.480.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI		SISA ANGGARAN	
		PAGU DIPA AWAL	JANUARI 5,52%	JANUARI	S.D JANUARI	(%)	
	dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan						
AEA.003	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	268.307.880	771.000	771.000	0,02	3.843.291.000
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.900.000.000	104.880.000	46.619.345	46.619.345	4,13	1.083.127.655
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	33.120.000	46.619.345	46.619.345	12,18	336.040.655
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	55.200.000	0	0	0,00	1.000.000.000
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	16.560.000	0	0	0,00	300.000.000
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000.000.000	110.400.000	0	0	0,00	2.000.000.000
BDG 001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	2.000.000.000	110.400.000	0	0	0,00	2.000.000.000
PCA	Perizinan Produk	2.500.000.000	138.000.000	0	0	0,00	2.500.000.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI		SISA ANGGARAN	
		PAGU DIPA AWAL	JANUARI 5,52%	JANUARI	S.D JANUARI	(%)	
PCA 001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	138.000.000	0	0	0,00	2.500.000.000
PEH	Promosi	3.500.000.000	193.200.000	0	0	0,00	3.500.000.000
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	193.200.000	0	0	0,00	3.500.000.000
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.404.489.000	132.727.793	0	0	0,00	2.404.489.000
QDB 001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.,000	49.941.041	0	0	0,00	904.729.,000
QDB 002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	1.499.760.000	82.786.752	0	0	0,00	1.499.760.000
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	684.460.000	37.782.192	0	0	0,00	684.460.000
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	684.460.000	37.782.192	0	0	0,00	684.460.000
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.998.000.000	165.489.600	0	0	0,00	2.998.000.000
QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	165.489.600	0	0	0,00	2.998.000.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		PAGU DIPA AWAL	JANUARI 5,52%	JANUARI	S.D JANUARI	(%)	
QMA	Data dan Informasi Publik	1.500.000.000	82.800.000	0	0	0,00	1.500.000.000
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	82.800.000	0	0	0,00	1.500.000.000
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.205.000.000	232.116.000	0	0	0,00	4.205.000.000
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	232.116.000	0	0	0,00	4.205.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	117.063.827.000	6.461.923.250	2.077.669.160	2.077.669.160	1,99	102.124.801.840
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	117.063.827.000	6.461.923.250	2.077.669.160	2.077.669.160	1,99	102.124.801.840
AEC	Kerja sama	1.224.972.000	67.618.454	0	0	0,00	1.224.972.000
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	1.224.972.000	67.618.454	0	0	0,00	1.224.972.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	94,699,016,000	5.227.385.683	1.704.847.547	1.704.847.547	1,93	86.675.260.453
EBA.956	Layanan BMN	525.011.000	28.980.607	0	0	0,00	525.011.000
EBA.957	Layanan Hukum	1.141.900.000	63.032.880	8.300.000	8.300.000	1,21	678.192.000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.899.500.000	160.052.400	0	0	0,00	2.899.500.000
EBA.959	Layanan Protokoler	792.600.000	43.751.520	0	0	0,00	792.600.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI		SISA ANGGARAN	
		PAGU DIPA AWAL	JANUARI 5,52%	JANUARI	S.D JANUARI	(%)	
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.934.000.000	106.756.800	12.000.000	12.000.000	1,01	1.181.087.000
EBA.962	Layanan Umum	8.348.720.000	460.849.344	61.079.200	61.079.200	1,17	5.151.838.800
EBA.994	Layanan Perkantoran	79.057.285.000	4.363.962.132	1.623.468.347	1.623.468.347	2,07	76.622.456.653
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.313.304.000	127.694.381	0	0	0,00	2.313.304.000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.313.304.000	127.694.381	0	0	0,00	2.313.304.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.887.686.000	104.200.267	0	0	0,00	1.887.686.000
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.887.686.000	104.200.267	0	0	0,00	1.887.686.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	12.328.986.000	680.560.027	366.561.864	366.561.864	4,88	7.142.931.136
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.129.682.000	338.358.446	0	0	0,00	6.129.682.000
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	55.200.000	0	0	0,00	1.000.000.000
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.945.500.000	107.391.600	262.052.900	262.052.900	23,96	831.819.100
EBD.965	Layanan Audit Internal	3.253.804.000	179.609.981	104.508.964	104.508.964	5,72	1.723.085.036
PAD	Peraturan Presiden	440.000.000	24.288.000	0	0	0,00	440.000.000
PAD 001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	440.000.000	24.288.000	0	0	0,00	440.000.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		PAGU DIPA AWAL	JANUARI 5,52%	JANUARI	S.D JANUARI	(%)	
QMA	Data dan Informasi Publik	3.669.863.000	202.576.438	6.259.749	6.259.749	0,19	3.226.300.251
QMA 001	Data dan Informasi Pangan	3.669.863.000	202.576.438	6.259.749	6.259.749	0,19	3.226.300.251
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	500.000.000	27.600.000	0	0	0,00	500.000.000
UAB 001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	500.000.000	27.600.000	0	0	0,00	500.000.000

